BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang tidak akan pernah dilepaskan dari beragam konteks kehidupan kebudayaannya. Salah satu konteks kebudayaan yang dimaksud adalah manusia tenggelam dalam alam fikiran dan tindakannya. Berfikir dan bertindak merupakan bagian dari kebudayaan manusia yang menghasilkan suatu hubungan antar sesama manusia. Demikian pula melalui kedua hal tersebut manusia membentuk sistem sosial yang menjadi acuan dan penyaring dalam kehidupan umat manusia itu sendiri.

Kebudayaan bagi manusia sangat penting, mengingat bahwa kebudayaan itu berisi beberapa aspek pengetahuan dan perilaku, seperti, aspek gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diadakan mendukung aktivitas baik sebagai individu maupun dalam bermasyarakat dan menjadi milik manusia serta menjadi bahan pembelajaran[1]. Adanya unsur belajar dalam kebudayaan menunjukkan bahwa suatu kebudayan merupakan media dalam kehidupan manusia itu sendiri. Pengertian ini juga diperkuat oleh beberapa ahli antropologi, terkenal, seperti, C. Wissler, C. Khuckhohn,

---

[1] Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia.* Jakarta: Djambatan 1990, hal. 180

A. Davis dan H. Hoebel dalam berbagai karyanya[2]. Predikat sebagai salah satu media pembelajaran antar budaya manusia merupakan esensi pokok mengapa studi antropologi sosial terhadap manusia menjadi amat penting dilakukan karena sangat terkait langsung dengan kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri.

Dalam konteks kajian antropologi sosial, beragam aspek yang dapat diketahui dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan suatu komunitas yang di dalamnya tumbuh suatu interaksi antara individu dengan individu lainnya sebaliknya antara individu dengan kelompoknya yang menumbuhkan suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjadi pedoman berprilaku. Dalam tatanan tersebut terdapat nilai, norma dan hukum yang menjadi patokan manusia dalam berinteraksi, seperti, nilai harmoni, kerja keras, cara berorganisasi dan sistem sistem sosial yang ditaati bersama. Norma sosial seperti, menghormati orang yang lebih tua, tidak mencurangi orang lain, saling membantu, menjaga kehormatan keluarga, sopan santun dalam interaksi sosial dan segala yang berkaitan dengan keutuhan masyarakat. Nilai dan norma itulah yang menjadi pola dan mempengaruhi tingkah laku manusia yang memiliki daya perekat sehingga membentuk masyarakat menjadi teratur sebagai suatu komunitas. Keterikatan manusia dalam berinteraksi melalui tatanan tersebut membentuk suatu kelompok yang

[2] Ibid.

disebut sebagai masyarakat[3]. Bahkan, nilai-nilai dalam tatanan tersebut harus dilaksanakan secara terus menerus dan dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga menjadi adat istiadat yang mengikat semua warga masyarakat[4].

Manusia sebagai makhluk berbudaya, dalam aktivitasnya memiliki banyak aspek yang dapat menjadi fokus analisis. Para ahli antropologi, khususnya antropologi sosial telah mengemukakan bahwa dalam kehidupan berbudaya, manusia memiliki kesamaan dan perbedaan budaya, pemeliharaan budaya maupun perubahannya dari masa ke masa[5]. Dalam kaitan itu, studi terhadap manusia dari sudut pandang antropologi-sosial adalah suatu studi mengenai penemuan unsur-unsur persamaan di bidang anekawarna, beribu ribu masyarakat dan kebudayaan manusia di muka bumi, dengan tujuan untuk mencari pengertian tentang asas-asas hidup masyarakat dan kebudayaan manusia pada umumnya[6]. Asas-asas kehidupan bermasyarakat dimaksud, berupa tatanan, nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang digunakan manusia dalam beberapa kegiatan, misalnya, perkawinan, pembentukan kekerabatan, berdagang, berpoliti dan semua yang mengarah pada dinamika kehidupan.

---

[3] Ibid, hal. 145
[4] Ibid, hal. 180
[5] David Kaplan, *Teori Budaya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002: hal. 3.
[6] Op.cit. hal. 26.

Perkawinan adalah suatu institusi atau pranata sosial yang sangat penting dalam masyarakat dan merupakan jembatan dalam pembentukan keluarga dan kekerabatan. Dalam antropologi, kata pranata atau institusi sama sebutannya dengan unsur unsur kebudayaan[7]. Dalam berbagai maksud dan fungsi pranata, secara teoretis, memiliki dimensi yang sangat luas dan beragam. Sekian banyak fungsi pranata sosial, salah satu fungsinya yang relevan dengan kajian antropologi sosial adalah pranata difungsikan sebagai pemenuhan keperluan kehidupan kekerabatan, yaitu yang sering disebut *kinship* atau *domestic institutions* [8]. Jika perkawinan sebagai salah satu unsur kebudayaan, maka melalui kajian ini akan dijelaskan status kekerabatan seseorang berdasarkan *wija* dan *bati*. Kedua konsep sistem kekerabatan ini, berkorelasi dalam menetukan status kekerabatan seseorang. Bahkan, *wija* dan *bati* dapat menjadi acuan untuk menentukan apakah seseorang termasuk dalam jaringan kekerabatan dan acuan bagi prestasi tertentu.

Penelusuran status seseorang berdasarkan pola *wija* dan *bati* sangat penting, khususnya dalam beberapa aktivitas manusia dalam masyarakat. Aktivitas yang biasanya menggunakan kedua pola tersebut, umumnya dalam hubungan perkawinan. Bahkan, kedua pola tersebut menjadi ukuran menentukan “derajat darah” dan ‘keturunan’ seseorang pada suatu sistem

[7] Ibid, hal. 164.
[8] Ibid, hal. 166.

kekerabatan tertentu. Hal ini penting diketahui, oleh karena dalam interaksi sosial, khususnya prosesi perkawinan masyarakat masih mengikuti pola-pola kekerabatan berdasarkan *wija* dan *bati* sebagai landasan terjadinya peristiwa kawin-mawin. Selain itu, kekerabatan juga digunakan sebagai sarana memperluas jaringan hubungan sosial dalam masyarakat.

Sistem kekerabatan berdasarkan *wija* dan *bati*, terikat oleh berbagai aturan, norma dan pranata yang dijadikan acuan dalam perkawinan. Aturan atau norma tersebut terangkum dalam panggadereng (*ade*, *siri, rapang, wari,*). Dianutnya aturan, norma disebabkan karena perkawinan sebagai pranata sosial, didalamnya terdapat penetapan-penetapan status kekerabatan, terutama dalam menentukan derajat darah keturunan sebagai simbol status sosial. Bahkan, dalam prakteknya, perkawinan dan pembentukan kekerabatan keduanya (wija dan bati) menjadi asas atau prinsip dan mendukung legitimasi kekuasaan dalam keluarga, dan kewenangan bertindak dalam masyarakat. Demikian pentingnya konsep wija dan bati harus dipertimbangkan dalam pemilihan jodoh atau calon suami/isteri,oleh karena berkaitan dengan martabat keluarga yang ingin tetap dipertahankan, agar keturunan yang lahir kemudian menjaga diri dan kewibawaan keluarga sebagai orang yang mempunyai abbatireng ampijangeng yang baik dan berguna. Wija dan bati seperti inilah yang diharapkan menduduki fungsi-fungsi tertentu dalam pranata sosial, sehingga konsep ini merupakan simbol budaya yang diingini guna mewujudkan kadar kualitas masyarakat.

Kualitas masyarakat, tentu ada kaitannya dengan individu yang lahir dari lingkungan keluarga yang baik. Konsep bati dan wija bukanlah semata-mata untuk kesombongan, melainkan berguna memelihara martabat keunggulan golongan elit yang merupakan pemimpin dan tokoh masyarakat. Pemimpin dan tokoh merupakan cermin kondisi dan representasi masyarakat. Apabila tokoh dan pemimpin berasal dari abbatireng yang unggul menurut kepercayaan masyarakat dan sistem sosial yang menjadi perekat jaringan sosial,akan aman dan sentosa.

Bagaimanapun konsep wija dan bati masa lalu, terwarisi sampai sekarang dalam pendidikan lembaga keluarga orang Bugis Bone, agar jasa dan pengabdian orang tua sebagai pendahulu, diikuti oleh generasi selanjutnya.

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan perkawinan yang dilakukan secara besar-besaran dan megah ditentukan kemampuan para pihak yang umumnya disesuaikan dengan status kekerabatan seseorang (*wija* atau *bati*) dalam masyarakat. Dalam persfektif antropologi sosial, fenomena tersebut ditentukan oleh stratifikasi sosial dengan melibatkan seluruh jaringan kekerabatan penyelenggaranya. Pesta dan upacara perkawinan merupakan simbol status sosial seseorang dalam masyarakat bertujuan untuk merealisasikan dan melanggengkan sistem kekerabatan serta “derajat darah” -nya dalam masyarakat.

Derajat darah dalam sistem kekerabatan tertentu, juga dapat mempengaruhi posisi seseorang dalam aktivitas sosialnya. Pengaruh itu tampak dalam acara-acara tertentu, seperti, perkawinan, kelahiran, kematian, dan pengangkatan sebagai tokoh masyarakat . Bahkan, derajat darah dapat menentukan stratifikasi sosial, dan jaringan kekerabatannya. Itulah sebabnya sehingga para ahli sosiologi mengasumsikan bahwa terbentuknya stratifikasi sosial erat kaitannya dengan pelembagaan sosial itu sendiri yang dijadikan sarana masyarakat dalam bertindak dan berinteraksi. Karena itu, ada hubungan fungsional struktural antara stratifikasi sosial dengan piranti sosial (perkawinan) dimana dalam proses pelembagaan diikat oleh nilai-nilai budaya masyarakatnya.

Salah satu nilai dan norma sosial adalah pembentukan sistem kekerabatan berdasarkan *wija* dan *bati.* *Wija* dan *bati* merupakan terminologi dalam perkawinan Bugis Bone yang lebih banyak berkonotasi biologis. Kedua hal tersebut mengandung sistem nilai budaya yang paling tinggi dan merupakan abstraksi dari adat istiadat masyarakat Bugis pada umumnya. Dikatakan demikian karena nilai-nilai budaya yang terdapat dalam *wija* dan *bati* adalah konsep yang masih hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat Bugis pada umumnya. Kedua konsep tersebut memuat endapan nilai-nilai budaya lokal bagi masyarakat Bugis mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting, sehingga dapat

berfungsi sebagai pedoman dan pemberi arah kepada kehidupan para warga masyarakat.

Selain itu, nilai-nilai budaya yang terdapat dalam *wija* dan *bati* juga berfungsi sebagai simbol dalam kehidupan masyarakat Bugis. Sebagai simbol, ia dapat menjadi sarana budaya lokal untuk melekatkan harmonisasi hubungan sosial (*social relationship*) antara individu baik dalam lingkungan kerabat sendiri maupu di luar kerabat. Bahkan,keduanya berdampak pada, hubungan sosial, pendidikan, ekonomi, pewarisan, politik dan pemerintahan. Fleksibilitas nilai-nilai budaya kedua hal tersebut akan selalu efektif disebabkan keduanya dapat menyentuh tatanan emosional kelompoknya. Keduanya dapat membentuk suatu ikatan kekerabatan yang kuat dan saling mendukung dan siap menjadi pewaris atau penganut nilai-nilai budaya yang sama. Bahkan, menurut Pantoja (1999) pranata tersebut (keluarga dan kekerabatan) termasuk dari salah satu dari enam elemen dasar modal sosial (*social capital*) baik sebagai modal sosial dalam '*Bridging Social Capital*'[9] maupun sebagai "*Bonding Social Capital*" [10].

[9] Modal sosial tipologi ***bridging social capital*'** adalah modal sosial yang didalamnya menganut prinsip persamaan, kebebasan, nilai-nilai kemajemukan, kemanusiaan, terbuka dan mandiri. Sedangkan tipologi ***bonding social capital*** adalah modal sosial yang didalamnya terdapat dogma tertentu yang mendominasi, mempertahankan struktur masyarakat totalitarian, hierarchical dan tertutup sehingga dalam interaksinya selalu dituntuntun oleh nilai-nilai dan norma-norma yang menguntungkan level hirakhi tertentu dan feodal. Dikutip dari buku Jousairi Hasbullah, Social Capital, Penerbit MR-United Press, Jakarta, 2006, hal. 25 – 33.

[10] Dikutip dari Jousairi Hasbullah, ibid.

Dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat Bugis baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang dijadikan pedoman yang memuat nilai-nilai ideal yang didalamnya terdapat filsafat kehidupan yang dapat mendorong terciptanya harmonisasi keluarga dan masyarakatnya. Niai-nilai ideal itu terdapat dalam sistem kekerabatan menurut *wija* dan *bati* sebagaimana asumsi teoretis beberapa ahli, seperti, dikemukakan oleh C. Kluckhon bahwa " setiap sistem nilai budaya dalam setiap kebudayaan itu terdapat lima masalah dasar dalam kehidupan manusia, yakni; 1) hakekat hidup, 2) hakekat karya, 3) hakekat kedudukan, 4) hakekat hubungan manusia dengan lingkungannya, dan 5) hakekat hubungan manusia dengan manusia[11]". Atas dasar asumsi itulah, maka salah satu hakekat pola *wija* dan *bati* yang memuat filosofi hubungan manusia dengan lingkungannya yang berimbang baik yang terkait dengan hubungan antara individu maupun yang diikat oleh suatu tatanan nilai yang sama, terpeliharanya stratifikasi sosial secara konsisten sehingga tercipta suatu kondisi tatanan sosial yang harmonis dan damai.

Setiap kebudayaan bersifat adaptif[12], sifat adaptif yang ditemukan dalam pola kekerabatan berdasarkan *wija* dan *bati* berupa mudahnya komunikasi antar individu sehingga melenturkan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat.

---

[11] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Rineka Cipta 1981, hal.191.

[12] Hoogvelt, dalam Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat.* Bandar Lampung: Dunia Pustaka Jaya, 1995, hal. 72.

Salah satu nilai budaya yaitu kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan kebutuhan fisiologis, dengan cepatnya menyesuaikan pada lingkungan yang bersifat fisik geografis, dengan lingkungan sosialnya.

Pemahaman akan lingkungan seperti itu, dengan penyesuaian yang dilakukan melalui nilai-nilai kebudayaan berdasarkan sistem kekerabatan, khususnya yang terbentuk melalui pola *wija* dan *bati* membutuhkan suatu pengamatan yang seksama dalam kaitannya dengan pembentukan sistem kekerabatan dalam masyarakat Bugis-Bone dan dampaknya terhadap kekehidupan sosial. Salah satu dampak dari kuatnya pola *wija* dan *bati* dalam lingkungan sosial masyarakat Bugis pada umumnya yaitu terpeliharanya sistem kekerabatan secara berkesinambungan dan telah menjadi kebiasaan budaya (tradisi). Pelanjutan kebiasaan dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan salah satu cara menyesuaikan diri dengan lingkungan. Meskipun demikian, cara penyesuaian tidak akan selalu sama untuk setiap orang atau kelompok. Ada individu atau kelompok masyarakat yang berlainan memilih cara yang berbeda terhadap keadaan yang sama. Alasannya, karena setiap orang bebas mengembangkan cara untuk mengahadapi sesuatu atau menemukan solusinya sendiri. Alasan–alasan ini sangat banyak dan bervariasi sehingga untuk mengetahui sejauh mana peranan pola wija dan bati mempengaruhi sistem sosial pada masyarakat Bugis-Bone pada khususnya atau masyarakat Bugis pada umumnya memerlukan suatu penelitian yang mendalam.

Dalam masyarakat Bugis, apabila ditarik secara linear ke dalam sistem nilai budaya Sulawesi Selatan, di dalamnya terdapat kompleksitas nilai nilai budaya lokal yang saling terkait satu dengan yang lainnya.Dalam keterkaitan satu sama lainnya, khususnya dalam pembentukan sistem kekerabatan, karena masing-masing kelompok masyarakat Bugis memiliki geneologis yang satu yaitu bermula dari konsep ***to manurung***. Konsep ini menjadi dasar pelebaran kekerabaran melalui proses kawin mawin baik melalui pola *wija* maupun *bati* sehingga memiliki sumber keturunan yang sama[13]. Kedua pola sistem kekerabatan tersebut merupakan karakteristik masyarakat Bugis pada umumnya. Karakteristik tersebut memiliki sifat dinamis dan inovatif yang dipraktekkan secara terbuka dan memberi ruang dan unsur pengaruh dari luar, sehingga dominan membawa perubahan dalam masyarakat. Perubahan mendasar yang dialami kedua pola tersebut yakni difungsikannya secara umum oleh semua lapisan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan sehingga kedua pola tersebut tidak lagi dipahami sebagai sistem kekerabatan murni (biologis) melainkan difungsikan sebagai simbol oleh individu atau kelompok dalam bidang-bidang tertentu, seperti, mencari pekerjaan, politik, mendapatkan jabatan pemerintahan, dan mengatasi konflik.

[13] Hal ini dapat ditelusuri lebih jauh dalam Tulisan Mattulada, Latoa, Suatu Analisis Antropologi Politik Masyarakat Bugis (1975), Abu Hamid, Penelitian Alat-Alat Kerajaan Sulawesi Selatan (daerah Bone), Christian Perlas, Manusia Bugis (2005), Monografi Masyarakat dsb.

Dalam perkembangan selanjutnya, pola *wija* dan *bati* di tengah adaptasi kebudayaan global, mengalami pergeseran substantif dari makna tradisi tradisi (biologis) menjadi makna-makna lain yang pada intinya menstimulan hubungan sosial agar lebih erat dan dekat sehingga dikategorikan sebagai satu kekerabatan (*assiajing*). Dalam kaitan itu, perubahan makna sebenarnya ke makna lain pada hakikatnya merupakan pelembagaan nilai-nilai normatif *wija* dan *bati* kedalam sistem sosial yang baru, yang menimbulkan ketaatan warga pada kedua nilai norma yang dikandungnya. Ketaatan otomatis pada kedua pola pembentukan sistem kekerabatan tersebut merupakan fenomena khas dari budaya itu sendiri. Meskipun kedua hal tersebut tidak tertulis namun karena ditaati oleh masyarakat (bagian dari *panggadereng*) keduanya memiliki pengaruh lebih kuat dan spontan[14]. Itulah sebabnya sehingga melalui pola tersebut lazim digunakan dalam perkawinan adat Bugis Bone khususnya dan masyarakat Bugis pada umumnya.

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti *siala'* saling mengambil satu sama lain. Jadi perkawinan itu adalah ikatan timbal balik[15]. Ikatan perkawinan sering disebut *elokni ri pakkalepu,* maksudnya akan diutuhkan. Walaupun mereka berasal dari status sosial berbeda, setelah menjadi suami istri mereka merupakan mitra. Hanya saja perkawinan bukan

[14] Malinowski, 1987: 5)
[15] Chriatian Pelras, *Manusia Bugis*, Nalar, Jakarta, 2006 hal. 178

sekedar penyatuan dua mempelai semata, tetapi suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud kian mempereratnya (*mappasideppe mabelae* atau mendekatkan yang jauh). Artinya, perkawinan dalam masyarakat Bugis selalu didasarkan pada pola *wija* dan *bati* sebagai keluarga terdekat yang hendak disatukan sehingga terikat dalam satu sistem kekerabatan.

Perkawinan masyarakat Bugis-Bone masih sangat dipengaruhi oleh hukum adatnya. Dalam lapisan *anakarung*, misalnya status lapisan sosial berdasarkan *wija* atau *bati* masih diperhitungkan. Masih sering dilakukan kebiasaan menelusuri keturunan yang disebut *maccuccung bati*. Penelusuran ini terutama memeriksa secara saksama apakah termasuk kategori *wija* atau *bati (*geneologis*)*. Konsekuensi dari penelusuran tersebut menimbulkan fenomena simbolik dalam masyarakat yaitu penentuan stratifikasi sosial melalui cara 'mencuri darah' (*mennau dara*) dengan jalan membuat silsilah yang dihubungkan seseorang *anakkarung* sebagai nenek atau buyutnya. Fenomena ini merupakan fakta dalam masyarakat Bugis-Bone, khususnya dalam acara perkawinan, pemilihan kepada desa.

Idealnya, perkawinan dilangsungkan dengan keluarga sendiri (*bati*). Perkawinan antar sepupu, sepupu paralel (yaitu keduanya melalui sisi ibu atau melalui bapak) ataupun sepupu silang yaitu satu dari sisi ibu dan satunya lagi bapak, dianggap sebagai perjodohan terbaik. Ada silang

pendapat di kalangan masyarakat Bugis tentang lapisan sepupu keberapa yang boleh dan yang tidak boleh dikawini. Banyak yang menganggap bahwa perkawinan dengan sepupu satu kali, (perkawinan semacam ini disebut *siala marola*) "terlalu panas", sehingga hubungan seperti itu jarang terjadi, kecuali di kalangan bangsawan tertinggi. Darah putih yang mengalir dalam tubuh mereka dan harus dipelihara membuat mereka melakukan hal itu, sebagaimana halnya tokoh-tokoh dalam cerita *La Galigo.* Sementara masyarakat biasa lebih menyukai perkawinan dengan sepupu kedua (*siala mimeng*), lalu sepupu ketiga dan keempat[16] .

Di daerah Propinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Bone kita masih dapat menjumpai masyarakat yang melangsungkan upacara pernikahan dengan berpatokan sistem kekerabatan tertentu (*wija* dan *bati*). Meskipun agama telah memberi wadah dalam justifikasinya, namun adat (*panggadereng*) diberi ruang dan mendapat dukungan sepenuhnya dari warga masyarakat. Timbulnya kecenderungan mempertahankan nilai-nilai budaya (tradisi), khususnya perkawinan yang didasarkan pada sistem kekerabatan sampai saat ini tetap berlanjut sampai sekarang. Prinsip utama yang dipegang adalah keteguhan dalam mempertahankan prestise keluarga. Suatu keluarga akan memiliki kehormatan ketika dapat melangsungkan pernikahan secara ideal berdasarkan adat istiadat dan sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut.

[16] Ibid, hal. 178.

Studi tentang perkawinan menurut adat istiadat, khususnya tentang sistem kekerabatan masyarakat Bugis-Bone khususnya, dan Bugis pada umumnya yang telah banyak dilakukan. Hasil studi itu antara lain, hasil penelitian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan Balai Kajian dan Nilai Tradisional (2006) *Adat dan Upacara Pekawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Husain Saidong (1998) *Jenis dan Makna Simbolik Makanan Tradisional Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis*, Faisal (1999) *Makna Simbolik Dalam Upacara Mappacci Pada Masyarakat Bugis*.

Studi tersebut menunjukkan bahwa tidak satupun yang membahas tentang sistem kekerabatan berdasarkan pola perkawinan *wija* dan *bati* di masyarakat Bugis Bone secara mendalam dalam bentuk disertasi. Semua penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam sistem kekerabatan Bugis Bone berdasakan *wija* dan *bati* dengan berbagai dimensi. Isu pokok yang utama penelitian terhadap *wija* dan *bati* sebagai sistem kekerabatan Bugis Bone karena dalam realitasnya, masyarakat Bugis Bone pada umumnya masih terikat dengan pola pola perkawinan menurut adat istiadat yang dalam proses peminangan masih menggunakan kriteria ”*maccuccung bati*” Padahal, dalam kenyataannya pola perkawinan berdasarkan *wija* dan *bati* tidak lagi berdasarkan sistem kekerabatan geneologis tetapi hanya digunakan sebagai simbol kekerabatan. Selain itu, dari sudut ilmu pengetahuan, khususnya kajian antropologi sosial penelitian ini bertujuan untuk mengkorelasikan teori-teori tentang susunan kekerabatan masyarakat

manusia pada umumnya sehingga dapat ditemukan adanya suatu universalitas pola atau sistem kekerabatan manusia.

Selanjutnya, studi tersebut menunjukkan bahwa studi tentang *wija* dan *bati* sebagai sistem kekerabatan dalam masyarakat Bugis-Bone sangat penting sebagai suatu kajian antropologi, khususnya antropologi-sosial, baik dari aspek kepentingan akademis maupun kepentingan praktis dalam mempertahankan dan melestarikan nilai nilai luhur yang terkandung di dalam sistem kekerabatan. Jika hal ini tidak mendapat perhatian, maka tidak menutup kemungkinan keunikan dan kekhasan *abbatireng* dan *ampijangeng* sebagai sistem kekerabatan masyarakat Bugis-Bone terancam punah hingga tertelan oleh pengaruh budaya globalisasi.

Kekerabatan yang terbentuk melalui perkawinan memiliki konsekuensi kultural yang secara lansung dapat menentukan derajat seseorang dalam masyarakat. Dalam tradisi masyarakat Bugis pada umumnya, terdapat dua bentuk kekerabatan yang lazim digunakan yaitu *wija* dan *bati*. Kedua pola kekerabatan tersebut sejak dahulu sampai sekarang masih eksis sebagai terminologi budaya masyarakat Bugis pada umumnya di Sulawesi Selatan.

Wija dan *bati* dalam persfektif antropologi sosial merupakan pranata sosial yang terbentuk berdasakan sistem kekerabatan dalam masyarakat Bugis pada umumnya. Sistem kekerabatan ini terbentuk bila ada

perkawinan dilakukan dalam masyarakat. Pelekatan derajat kekerabatan berdasarkan pola perkawinan *wija* diperoleh seseorang ketika perkawinan dilakukan sesama di luar sistem *abbatireng* tertentu (*assiajing saliweng*) dalam masyarakat, sedangkan *bati* merupakan pola perkawinan berdasarkan dalam lingkungan kerabat sendiri (*assiajing memang*). Penggunaan pola pembentukan keluarga masyarakat Bugis pada umumnya dianut. Pola perkawinan ini dikenal dalam berbagai tulisan disebut sebagai perkawinan berdasarkan *abbatireng*[17].

Dewasa ini dalam masyarakat Bugis Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Bugis Bone, pembentukan sistem kekerabatan berdasarkan *wija dan bati* memiliki banyak fungsi yaitu fungsi pembentukan struktur sosial dan fungsi pembentukan stratifikasi sosial. Fungsionalisasi sistem kekerabatan ini memiliki daya mengikat dalam masyarakat, terutama bila seseorang akan melangsungkan perkawinan. Kuatnya fungsionalisasi kelembagaan ini disebabkan karena nilai nilai kultural masih melekat dan terpelihara secara utuh dalam adat istiadat masyarakat Bugis Bone. Dalam konsep antropologi sosial, adat istiadat merupakan suatu endapan nilai-nilai kultural masyarakat yang memiliki kekuatan magis yang sulit dikesampingkan oleh setiap orang terutama apabila seseorang akan melangsungkan perkawinan.

[17] Ulasan lebih dalam pada berbagai tulisan, seperti, Mattulada, Christian Perlas,

Sifat magis adat istiadat masyarakat Bugis Bone tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan masyarakat Bone, terutama pembentukan kerajaan Bugis Bone. Pada kerajaan Bugis Bone pembentukannya dimulai dari apa yang disebut dengan *to Manurung*. *To Manurung* dalam persfektif antropologi sosial merupakan konseptualisasi mitologi kultural yang tertanam dalam adat istiadat, yang kemudian menjadi nilai atau norma yang melembaga dalam masyarakat Bugis pada umumnya yang disebut *pangngadereng*.

Pangngadereng dalam masyarakat Bugis-Bone menjadi tradisi kultural masyarakat yang telah menjadi kaidah pengikat yang diwariskan secara turun temurun baik dalam sistem pemerintahan maupun melalui lembaga perkawinan. Pewarisan nilai nilai kultural dimaksud tampak pada perilaku dan sikap masyarakat Bugis-Bone yang tercermin dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satu pengaruh nilai nilai kultural *pangadereng* tampak pada pembentukan sistem kekerabatan dalam masyarakat Bugis-Bone, termasuk di dalamnya pembentukan pola kekerabatan melalui *wija* dan *bati.* Dalam kaitan itu, *panggadereng* memiliki hubungan fungsional yang erat dengan pembentukan sistem kekerabatan yang dalam persfektif antropologis sosial disebut sebagai pelembagaan asas asas kehidupan suatu masyarakat[18]. Asas asas kehidupan masyarakat Bugis Bone tersebut menjadi dasar pembentukan *wija* dan *bati* sebagai sistem

[18] Op.cit, Koenjtaraningrat, hal. 26.

kekerabatan masyarakat Bugis-Bone khususnya dan masyarakat Bugis pada umumnya.

Banyak studi antropologi sosial yang membahas tentang sistem kekerabatan sebagai salah satu produk budaya komunitas tertentu. Akan tetapi, studi tentang *wija* dan *bati* sebagai pola pembentukan sistem kekerabatan dalam masyarakat Bugis Bone belum ada sehingga layak menjadi objek penelitian. Kelayakan studi terhadap pola wija dan bati dalam penelitian ini disebabkan karena kedua pola tersebut menjadi sarana atau simbol menentukan posisi seseorang dalam sistem kekerabatannya. Bahkan kedua pola ini masih hidup dan menjadi simbol serta dilembagakan secara turun temurun. Kedua pola ini akan lebih banyak difungsikan dalam acara perkawinan, kelahiran, pengangkatan kepala adat atau apabila seseorang akan menduduki jabatan pemerintahan, pendidikan, sosial, ekonomi serta konflik kemasyarakatan.

Namun, patut disayangkan para ahli antropologi, khususnya para peneliti antropologi-sosial menaruh perhatian secara serius terhadap fenomena fenemena pembentukan sistem kekerabatan berdasarkan pola *wija* dan *bati* pada masyarakat Bugis Bone khususnya dan masyarakat Bugis pada umumnya. Kurangnya tulisan dan penelitian dimaksud dapat diketahui dari beberapa tulisan tentang Masyarakat Bugis-Bone dan masyarakat Bugis pada umumnya seperti, tulisan Mattulada tentang *Latoa* ,"Suatu Analisis Terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis (1975) dan tulisan

berjudul Sejarah, Masyarakat dan Kebudayan Sulawesi Selatan (1998) Tulisan Ny. Aminah tentang Monografi Kebudayaan Bugis di Sulawesi Selatan (1984), tulisan Pananrangi Hamid dan Tatiek Kartikasari tentang ”Lontarak Tellumpoccoe (1993). Selain itu, tulisan Suriadi Mappangara tentang Kerajaan Bone dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abab XIX (2004), tulisan (disertasi) Halilintar Latief tentang Kepercayaan Orang Bugis di Sulawesi Selatan (2005) dan terakhir tulisan Christian Perlas tentang Manusia Bugis (2006). Oleh karena itu, penelitian tentang *wija dan bati* sebagai sistem kekerabatan masyarakat Bugis Bone layak untuk diteliti. Beberapa tulisan tersebut dan sampai saat ini belum ada temuan yang membahas secara intensif dan komprehensip tentang konsep *abbatireng* dan *ampijangeng* sebagai sistem kekerabatan dalam persfektif antropologi sosial. Masalah-masalah yang tampak dalam masyarakat, seperti, pelekatan status keturunan *anakkarung* (apakah sebagai *bati'* atau *wija*) kepada seseorang untuk tujuan-tujuan tertentu, padahal yang bersangkutan tidak pantas. Bahkan, muncul fenomena dalam masyarakat saat ini yang disebut ”***mangelli dara***” (membeli darah) dan ”***mennau dara***” (mencuri darah) atau ”**partai kekerabatan**” yang belum dibahas tulisan-tulisan terdahulu. Kajian tentang seberapa jauh makna *abbatireng* dan *wija* sebagai sistem kekerabatan masyarakat Bugis-Bone mempengaruhi wawasan budaya, sikap budaya dan pola perilaku masyarakat Bugis-Bone masa kini dalam kehidupannya sehari hari. Bahkan, studi tentang *abbatireng* sebagai

sistem kekerabatan dalam persfektif antropologi sosial pada saat ini semakin diperlukan untuk tujuan tujuan tertentu, seperti, penyelesaian konflik etnik, solusi pembangunan ekonomi, dan politik yang pada umumnya dapat digunakan sebagai ” katup” pengaman sosial. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya apabila tulisan ini membahas lebih dalam tentang konsep *wija* dan *bati* sebagai sistem kekerabatan masyarakat Bugis-Bone serta pengaruhnya sampai saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang kekerabatan di Bone tersebut, maka issu penelitian difokuskan mengapa *wija* dan *bati* masih tetap bertahan sebagai sistem kekerabatan pada masyarakat Bugis Bone. Untuk menjawab persoalan di atas maka studi ini menurunkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana dimensi pendidikan keluarga dalam pembentukan wija dan bati sebagai sistem kekerabatan?
2. Bagaimana kualitas kepemimpinan melalui pembentukan wija dan bati sebagai sistem kekerabatan?
3. Bagaimana pembentukan kualitas masyarakat melalui wija dan bati dalam sistem kekerabatan ?

4. Bagaimana sejarah dan budaya mendukung pembentukan *bati* dan *wija* sebagai suatu sistem kekerabatan ?

Menjawab serangkaian pertanyaan di atas tentunya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mempertahankan nilai-nilai lokal (*local value*) secara konstruktif dan berkesinambungan terhadap eksistensi *abbatireng* dan *wija* sebagai sistem kekerabatan masyarakat Bugis-Bone, yang pada akhirnya dapat menjadi konstruksi berpikir dalam penataan kehidupan keluarga dalam suatu susunan kekerabatan di Sulawesi Selatan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dimensi pendidikan keluarga dalam pembentukan *wija* dan *bati* sebagai sistem kekerabatan
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas kepemimpinan dalam pembentukan wija dan bati sebagai sistem kekerabatan.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dimensi pembentukan kualitas masyarakat melalui *wija* dan *bati* dalam sistem kekerabatan
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejarah-budaya dalam mendukung pembentukan *bati* dan *wija* sebagai suatu sistem kekerabatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka dirumuskan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini akan berguna sebagai tambahan referensi atau literatur demi pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya pada umumnya, dan budaya masyarakat Bugis-Bone yang hingga kini tetap dipertahankan sebagai salah satu pengetahuan lokal masyarakat di Sulawesi Selatan.
2. Secara praktis penelitian ini berguna untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan masalah-masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan politik yang muncul selama dalam proses masyarakat yang sedang berubah.

E. Orisinilitas Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan sementara terhadap sumber-sumber yang berhubungan dengan budaya adat masyarakat Bugis-Bone, diketahui bahwa tulisan ini merupakan karya pertama yang membahas secara total gambaran tentang abbatireng dan ampijangeng sebagai sistem kekerabatan masyarakat Bugis-Bone dan makna simboliknya. Meskipun demikian, tulisan mengenai ini telah banyak dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu, namun

sampai sekarang belum ada menyoroti secara komprehensip tentang konsep *bati* dan *wija* sebagai sistem kekerabatan dalam persfektif antropologi –sosial. Selain itu, tulisan Shelly Errington berjudul *Meaning and Power in a Southeast Asian Realm* yang menulis tentang kekuatan kerajaan di Asia Tenggara yang menggambarkan kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa.

BAB II

SETTING : MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN BUGIS-BONE

A. Letak Geografis, Demografis, dan Keadaaan Alam

Kabupaten Bone adalah salah satu dari 26 Kabupaten dalam propinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pesisir jazirah, pada posisi $4^0$13' – $15^0$06 lintang selatan dan antara $119^0$42 – $120^0$30 bujur timur. Kota Watampone, Ibukota Kabupaten Bone terletak 174 Km ke arah timur dari kota Makassar. Kabupaten Bone berbatasan dengan :

- Sebelah utara dengan Kabupaten Wajo
- Sebelah timur dengan teluk Bone
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Sinjai
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru

Sebagai suatu daerah administratif pemerintahan, Kabupaten Bone terdiri atas 27 Kecamatan; 333 desa dan 39 keluarahan; 893 dusun dan 121 lingkungan (Profil Kabupaten Bone, 2003: 5). Pada tahun 2002 jumlah penduduk 648.315 jiwa (305.317 laki-laki, 47,09% dan 343.044 jiwa perempuan, 52,91%) (Mahmud, 2002: 129). Jumlah tersebut meningkat dalam pencatatan penduduk sesuai data pemilihan umum pada tahun 2004 menjadi 684.768 jiwa, sehingga kepadatan penduduk rata-rata 140 jiwa per Km^2

Keadaan alamnya Terdiri dari 3 dimensi yaitu :

1. Wilayah pegunungan dengan ketinggian antara 150 – 300 m dari permukaan laut
2. Wilayah dataran rendah
3. Wilayah pantai

Adapun jenis tanah yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari tanah Aluvial, Gleilumus, Litosol, Regosol, Grumosol, Madeteran dan Renzina, jenis tanah di dominasi oleh mediteran seluas 67,6 % dari total wilayah, kemudian Renzina 9,596 % dan Litosol 19 %.

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang kelembaban udara berkisar antara 95 % - 99 % dengan temperatur berkisar 26^0 C - 43^0 C. Pada periode April-September bertiup angin timur yang membawa hujan, sebaliknya pada bulan Oktober-Maret bertiup angin barat, dimana pada waktu itu Kabupaten Bone mengalami musim kemarau. Disamping kedua sektor yang terkait dengan iklim tersebut di atas, terdapat juga sektor peralihan yaitu Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian wilayahnya mengikuti sektor barat dan sebagian lagi mengikuti sektor timur.

Adapun kelembaban udara rata-rata di Kabupaten Bone tahun 1997 - 2001, rata-rata penyinaran matahari di Kabupaten Bone tahun 1997-2001,

suhu udara minimun (0°C) dan jumlah hari hujan di Kabupaten Bone tahun 1997-2001.

B. Kondisi Sosial Budaya

1) Agama dan kepercayaan.

Penduduk Bone pada umumnya menganut agama Islam. Bagian terbesar dari umat Islam di Bone mengikuti faham *Ahlu Sunnah wal Jamaah,* sehingga menjadi pengikut pasif dari organisasi Nahdatul Ulama (NU). Bagi masyarakat awam, *Ahlu Sunnah wal* Jamaah dianggap identik dengan organisasi NU. Selain itu, terdapat juga penganut Islam pengikut tarekat *Khalwatiah* dan *Naksyabandia,* serta pengikut tarekat *WAKTU.* Organisasi sosial Muhammadyah memiliki anggota dan pengikut pasif yang cukup besar. Sekalipun telah memeluk Agama Islam, namun pengaruh kepercayaan lama masih tampak walaupun tidak menyolok. Di daerah-daerah yang pemah dikuasai DI-TII seperti sebagian daerah Bone barat dan Bone Selatan, ritual kepercayaan lama relatif tidak tampak di permukaan kehidupan masyarakat, namun di daerah-daerah lain, ritual kepercayaan lama masih dilakukan oleh golongan masyarakat tertentu.

Salah satu kepercayaan yang paling menyolok adalah kepercayaan pada adanya waktu-waktu, bulan-bulan dan hari-hari baik dan buruk. Kepercayaan mengenai hal tersebut agaknya berkembang sejak dahulu kala dan merupakan kepercayaan tradisional, yang dipadu dengan kepercayaan

falakiyah yang bersumber dari pengaruh Islam. Untuk memulai suatu aktivitas, kualitas waktu sangat diperhitungkan. Penentuan hari pernikahan dan waktu pelaksanaan akad nikah, sangat terpengaruh oleh kepercayaan mengenai kualitas waktu tersebut. Perhitungan yang disebut *Bilang Coro'* misalnya menyebutkan bahwa pada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal hari yang tidak baik memulai atau melakukan pekerjaan adalah pada hari Jumat, bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir adalah pada hari Kamis, Rajab, Syakban dan Ramadan pada hari Selasa; dan Syawal, Zulkaidah dan Zulhaji pada hari Sabtu. Pada hari yang termasuk dalam hitungan *Bilang Coro*' tersebut penganut kepercayaan itu berpantang melakukan yang tidak sesuai adat-istiadat, misalnya acara perkawinan atau mendirikan rumah.

Kepercayaan orang Bugis tersebut diwarisi secara turun temurun. Demikian pula dalam setiap pengambilan keputusan utamanya mencari hari baik, maka biasanya diserahkan kepada orang tua yang masih mengetahui perhitungan dalam *lontarak bilang.*

Dalam *lontarak bilang,* pasal mengenai kualitas waktu dalam sehari (*passaleng panessaenngi lisek wettu ri lalenna tassiessoe*), yang isinya masih mempengaruhi kepercayaan sebagian masyarakat Bone, waktu-waktu dalam sehari dibagi menjadi: waktu pagi yang disebut *elek,* waktu naiknya matahari yang disebut *abueng-bueng,* waktu tengah hari yang disebut *tangasso,* waktu condongnya matahari ke barat disebut *lesangngesso,* dan

waktu sore hari disebut *araweng.* Pada setiap hari, waktu waktu itu memiliki kualitasnya masing-masing. Hunaeni mengungkapkan kembali perincian kualitas waktu dalam sehari, dari sumber *Lontarak Bilang,*[19] Koleksi Pribadi milik H. Muh. Rafi, yang gambarannya sebagai berikut:

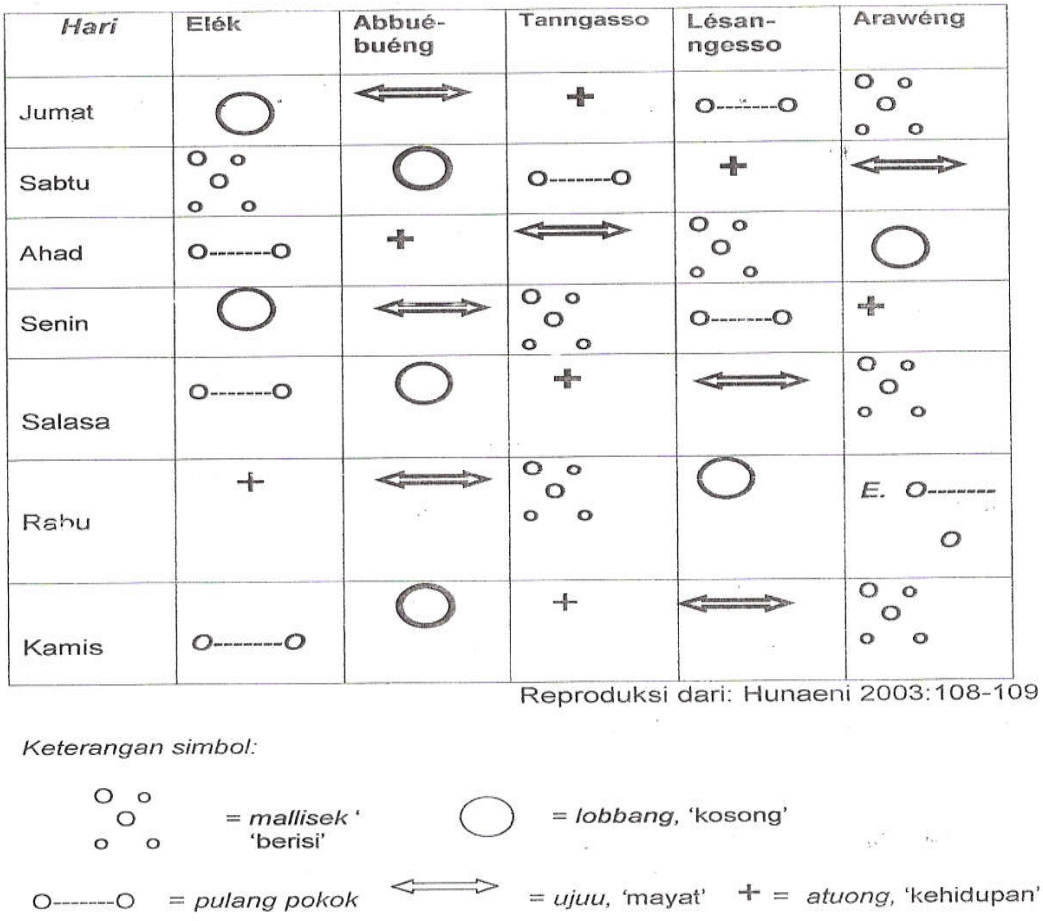

Tabel 1. Kualitas bagian waktu dalam satu hari dan simbol-simbolnya :

[19] Hunaeni, *Ekspresi Simbolik dalam Entoarsitektur Rumah Tradisional Bugis di Kabupaten Bone, Suatu Tinjauan Antropologi Linguistik* (Tesis). Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2003, hal.108-109.

2) Stratifikasi Sosial

Friedericy membagi stratifikasi sosial orang Bugis menjadi 3 bagian besar, yaitu lapisan *Anakarung;* lapisan *Tomaradeka* dan lapisan *Ata.* Akan tetapi, tampaknya istilah *Tomaradeka* tidak lazim dikenal di Bone. Di dalam *lontarak* istilah *tomaradeka* cenderung tidak pemah disebutkan. Demikian pula dalam pergaulan dewasa ini. Istilah yang digunakan dalam *lontarak* ialah orang biasa (*tosamak*). Selain itu dikenal pula istilah orang baik-baik (*Todeceng*). Lapisan sosial yang paling rumit pengkategoriannya adalah lapisan (*Anakarung).* Dalam lapisan sosial *anakarung* ini terdapat lagi belasan lapisan, hasil dari proses kawin-mawin antara orang-orang yang tidak setara derajat darahnya. Istilah *todeceng* agaknya memiliki posisi tertentu dalam stratifikasi sosial. Dalam sastra *paseng,* yaitu karya-karya sastra yang berisi pesan-pesan atau wasiat-wasiat, *todeceng* dibagi menjadi Orang baik-baik biasa yang disebut *Todeceng* dan orang baik-baik yang memperbaiki yang sebut *Todeceng mappadeceng.* Orang baik-baik, *todeceng,* terutama *Todeceng mappadeceng* dihargai dan dianggap lebih tinggi dari lapisan orang biasa, *tosama,* dan adakalanya disamakan kedudukannya *(Ripasitudangeng iyarekga ripappadai tudangenna)* dengan orang yang disebut lapisan *anakarung.* Lapisan sahaya (*ata)* dianggap sudah tidak ada lagi, namun masih dikenal istilah Orang Suruhan *(to risuro)* yang umumnya adalah turunan orang-orang yang pernah mengabdi pada satu keluarga *ajjoareng.*

3) *Perkawinan*

Dalam masyarakat Bugis, perkawinan masih sangat dipengaruhi oleh stratifikasi sosialnya. Dalam lapisan *anakarung* misalnya, persoalan lapisan sosial masih diperhitungkan. Masih sering melakukan menelusuri keturunan yang disebut *maccuccung batik.* Oleh karena itu, muncul efek samping, yaitu mencuri darah (*mennau* dara) dengan jalan membuat (dibuatkan) silsilah yang dihubungkan dengan seseorang *anakarung* sebagai nenek atau buyutnya. Silsilah buatan dilegalisasi olen petugas (penilik) Kebudayaan dengan cap instansinya[20]

Perkawinan dengan sepupu derajat pertama lebih banyak berlangsung pada lapisan-lapisan tertinggi dalam stratifikasi sosial, akan tetapi tidak terlalu lumrah di kalangan *tosama.* Perkawinan yang paling ideal kalangan *tosama* adalah dengan sepupu derajat kedua.

Dewasa ini, telah lebih banyak perkawinan yang tidak lagi menjadikan hubungan kekeluargaan sebagai pertimbangan utama. Perkawinan umumnya tetap melalui proses, mulai dari tahap penjajakan, *mammmanuk;* tahap pelamaran, *massuro;* tahap akad nikah, dan tahap sesudah hari pemikahan. Pada setiap tahap ada berbagai kegiatan yang Dalam masyarakat biasa pada umumnya, telah terjadi penyederhanaan tahap tahap tersebut, misalnya tahap *mammanu manu,* sekedar

[20] Anwar Ibrahim, Derajat darah, Sperma dan Kekuasaan ,1987: 37

formalitas, karena pasangan yang hendak menikah sudah saling menyukai lebih dahulu. Kalangan yang moderat, misalnya, melakukan acara khusus menaikkan uang belanja (*mappenre balanca*) melainkan menggunakan jasa bank, mentransfer uang belanja ke rekening pihak perempuan. Dalam hal uang pekawinan (*doik balanca)* orang-orang Bone dikenal menetapkan jumlah paling tinggi di Sulawesi Selatan.

4) Struktur Kekerabatan

Dalam masyarakat manapun, hubungan kekerabatan merupakan aspek utama karena dinilai oleh anggotanya memiliki fungsi yang mendasar dalam pembentukan keluarga inti (*assiajing marilaleng*) dan perluasan keluarga (*extended family*) dalam suatu tatanan masyarakat. Dalam masyarakat Bugis Bone terbentuk suatu pola hubungan kekeluargaan berdasarkan sistem kekerabatan tertentu. Terbentuknya sistem kekerabatan pada masyarakat Bugis Bone dalam catatan sejarah Lontarak, merupakan salah suatu komunitas yang dibentuk berdasarkan silsilah *to manurung*. *To manurung* dalam catatan sejarah lontara' digambarkan sebagai orang yang memiliki cirri ciri khas tertentu yang lain dari penduduk sekitarnya. Dari *to manurung*, terbentuklah sistem kekerabatan yang dalam budaya masyarakat Bugis Bone sebagai *wija atau bati.*

Pembentukan sistem kekerabatan berdasarkan *bati'* berasal dari hubungan perkawinan antara sesama derajat atau stratifikasi sosial yang

sama. Perkawinan demikian disebut sebagai sesama kelas dalam masyarakat sedangkan *bati* merupakan perkawinan yang dilakukan antar sesama kerabat sendiri dalam masyarakat. Kedua cara perkawinan tersebut berlangsung menurut tata cara tersendiri sesuai dengan adat istiadat dan didukung oleh *pangadereng*.

Dalam masyarakat Bugis Bone bangunan sistem kekerabatan pada umumnya dikenal mengikuti lingkaran pergaulan kehidupan bilateral atau parental[21]. Penggunaan keduanya selanjutnya berkonsekuensi terbentuknya struktur dalam keluarga, seperti, lingkungan keluarga bati dimana posisi ayah sebagai kepala rumah tangga dan diwarisi oleh anak-anaknya yang laki-laki. Selain itu, hak dan kewajiban, struktur kekerabatannya juga mengikuti pola bilinial atau garis serba dua. Pola yang terakhir ini memuat asas persamaan kedudukan antara ayah dan ibu dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam lingkungan kerabat sendiri.

Dalam kaitannya dengan perkawinan, sistem kekerabatan masyarakatnya lebih memprioritaskan perkawinan dalam kalangan kerabat sendiri yang disebut ' *siampaiko masseajing, tenri batu mallepang*'. Beberapa istilah kekerabatan yang dikenal dalam masyarakat Bugis-Bone, seperti, *ambok, indok, emmak, lakkai, oroane, baine selessureng orowane, dan*

[21] Abu Hamid, 1978:176 Dalam buku berjudul "*Konsep Kerakyatan dalam Kebudayaan Orang Bugis di Sulawesi Selatan.* Makassar: Program Pascasarjana UNHAS.

selessureng makkunrai.[22] Dalam prakteknya, penggunaan sebutan-sebutan kekerabatan tersebut memiliki makna original dan virtual serta keduanya dapat dimaknai sebagai simbol atau sapaan kekerabatan. Sebagai makna original, biasanya digunakan sebagai sebutan dalam kerabat sendiri dan sebagai makna virtual digunakan untuk sapaan bagi orang lain yang dianggap dekat. Penggunaan makna original dikenal sebagai *abbatireng* atau *assiajingeng memeng* dan untuk makna yang kedua dikenal sebagai *wija*. Selain itu, dalam sistem kekerabatan masyarakat Bugis Bone dikenal pula istilah kekerabatan "*assiajing"* dan *siteppang teppangeng* atau *sompun lolo*[23]. Sistem kekerabatan berdasarkan *reppe* adalah kekerabatan karena adanya pertalian perkawinan antara para anggota keluarga, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Menurut sistem kekerabatan ini pihak laki-laki dapat mengawini perempuan yang tidak sedarah namun tidak berlaku sebaliknya sedangkan perempuan berlaku aturan tidak boleh kawin dengan lapisan sosial yang rendah [24].

Dalam sistem kekerabatan masyarakat Bugis-Bone mengenal tiga jenis perjodohan sebagai tangga untuk memasuki pintu perkawinan yaitu :

1. Perkawinan ***Assialang Marola*** yaitu suatu perkawinan antara sepupu sekali, baik secara paralel maupun *crouscaosin*. Perkawinan ini umumnya

---

[22] Istilah kekerabatan lebih dalam dapat dilihat dalam buku Mattulada, Latoa (1975), Abu Hamid, Penelitian Alat-Alat Kerajaan Sulawesi Selatan (Daerah Bone), 1974.

[23]Dikutip dari buku Suriadi Mappangara berjudul " Kerajan Bone Dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abab XIX,

[24] Ibid.

dilakukan pihak bangsawan. Hal ini erat hubungannya dengan keturunan dan darah bangsawan yang ada pada mereka. Jika terjadi perkawinan silang, misalnya seorang bangsawan dari keturunan *tomanurung* adalah sangat tercela jika mendapatkan jodoh dari golongan rakyat kebanyakan (*to samak*). Atau jika seorang perempuan bangsawan murni kerajaan mendapatkan jodoh dengan seorang pria yang berbeda, maka darah kebangsawanannya akan berkurang, dan anak yang dihasilkan dari perkawinan itu mengikuti sistem kekerabatan bapaknya. Meskipun demikian, aturan ini tidak berlaku penuh bagi seorang laki laki keturunan *to manurung*, aturan yang berlaku hanya pada keturunannya yaitu derajat kebangsawanan akan berkurang dan tidak berhak menduduki jabatan raja.

2. Perkawinan ***Assialang Memeng*** yaitu pekawinan yang dilakukan karena memiliki hubungan keluarga dari kedua belah pihak. Mereka adalah sepupu dua kali.

3. Perkawinan ***'Ripaddeppe 'Mabelae"*** yaitu suatu perkawinan yang dilakukakan oleh seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga, namun hubungan itu agak jauh. Perkawinan ini bertujuan untuk mendekatkan tali persaudaraan yang diangap sudah menjauhi [25].

Ketiga jenis penjodohan tersebut merupakan cikal bakal pembentukan

[25] Bandingkan dengan sistem perkawinan masyarakat Bugis-Bone yang ditulis oleh Christian Perlas,. Manusia Bugis, hal.178-185. Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis, Universitas Indoenesia,1975, hal.37.

sistem kekerabatan bagi masyarakat Bugis-Bone dan merupakan tipologi perkawinan yang selanjutnya akan berkembang. Bahkan munculnya istilah *bati* dan *wija* sebagai terminologi yang lebih populer di kalangan masyarakat Bugis pada umumnya.

Keluarga berdasarkan *bati'* bagi masyarakat Bugis-Bone merupakan hubungan perkawinan yang dilakukan dilingkungan keluarga inti atau menurut stratifikasi yang sama, sedangkan *wija* merupakan perkawinan yang dilakukan di luar keluarga ini atau perkawinan yang tidak sama stratifikasi sosialnya[26].

5) Mata Pencaharian

Studi antropologi adalah studi tentang kebudayaan suatu komunitas manusia. Salah satu aspek yang terkait dengan studi tersebut adalah studi tentang demografi[27]. Sektor pertanian masih tetap merupakan sektor mata pencaharian yang paling banyak digeluti masyarakat Bone. Mata pencaharian dalam terminologi antropologi menjadi salah satu isi dari gambaran kultural dari suatu masyarakat. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu juga tanaman jagung, kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Data tahun 1995 menunjukkan bahwa luas panen padi 1 120.292 ha dengan produksi padi 652.679 ton. Produksi jagung dari Wilayah panen 103.284 ha,

[26] Istilah *bati'* dan *wija* hanya ditemukan dalam sistem kekerabatan masyarakat Bugis pada umumnya sebagaimana diulas dalam tulisan Anwar Ibrahim, op.cit,hal.17-27.

[27] Hal ini juga dikemukakan oleh Claude Levi –Strauss sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kebudayaan manusia, dalam buku berjudul "Atropologi Struktural" diterjemahkan oleh Nini Rochani Sjams, Kreasi Kencana, Yogyakarta, 2005, Hal.

dengan produksi jagung 199.625 ton (Kabupaten Bone Dalam Angka 1995: 1 – 4). Untuk peningkatan taraf kehidupan masyarakat, mata pencaharian pertanian seperti itu, tampaknya belum memiliki prospek yang cerah. Penghasilan pertanian produsen beras masih berada di bawah penghasilan rata-rata masyarakat Bone.

Selain sektor pertanian, sektor perikanan (penangkapan ikan) terutama digeluti oleh penduduk Bone yang berdiam di pesisir pantai teluk Bone. Prdoduksi hasil laut yang berasal dari Bone telah memasuki pasaran nasional, terutama produksi udangnya. Produksi udang dan kepiting mencapai 4.243,3 ton tahun 1995. Jum!ah perahu/kapal penangkap ikan adalah 2018 unit tahun yang sama. Selain itu, telah ada juga pengusaha yang menanam modaInya untuk sektor penangkapan ikan, yang hasilnya diekspor ke luar.

Sektor Peternakan menghasilkan, 168.358 ekor sapi, 24270 ekor kerbau, 20923 ekor kuda, dan 14315 ekor kambing. Produksi sapi mengalami peningkatan berarti, sedang produksi kerbau cenderung mengalami penurunan. Sifat ternak sapi yang lebih cepat berproduksi agaknya membuat terjadinya peralihan pilihan ternak dari ternak kerbau ke ternak sapi.

Sektor perdagangan, terutama pedagang barang-barang campuran, pakan sumber mata pencaharian yang digeluti terutama oleh penduduk ,kota kabupaten dan ibukota kecamatan.

Sektor transportasi darat juga digeiuti. Dalam catatan Organisasi

Angkutan Darat (ORGANDA) Sulawesi Selatan, kendaraan angkutan kota di Sulawesi Selatan yang terbanyak jumlahnya adalah kendaraan ke poros Makassar - Bone. Angkutan mikrolet menjadi alat transportasi antar-desa dan antar kecamatan. Sektor transportasi menjadi salah satu sumber mata pencaharian penting. Sektor pertukangan tampaknya tidak, mengalami perkembangan yang berarti.

Sektor industri memberikan penghasilan penting pada daerah Bone. Niiai investasi untuk sektor industri mencapai Rp. 6.656.000,- meliputi industri makanan, minuman dan tembakau, industri tekstil, pakaian jadi, permadani dan kulit; industri kayu dan barang-barang kayu; industri kertas dan barang-barang dari kertas, industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batubara, karet dan plastik; industri barang gaiian bukan logam; industri logam dasar; industri dari barang logam mesin dan peralatannya; dan industri pengolahan lainnya.

Umumnya masyarakat Bugis Bone masih sangat mementingkan stratifikasi sosial berdasarkan status sosial berdasarkan pekerjaan. Bagi mereka yang bekerja sebagai pegawai, apalagi pegawai negeri, tentara atau polisi masih sangat didambakan. Seseorang bersedia mengeluarkan dana pengurusan sampai puluhan juta rupiah untuk memperoleh pekerjaan sebagai pegawai negeri termasuk guru, tentara atau polisi. Perilaku masyarakat tersebut merupakan suatu fenomena sosial yang menjadi bagian dari pola-pola interaksi sosial masyarakat di lokasi penelitian.

C. Arti Lambang Daerah Kabupaten Bone

Kabupaten Bone sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang dahulu merupakan daerah kerajaan yang besar yang didalamnya terdapat satu suku bugis yang disebut orang Bugis Bone. Sejak ia terbentuk menjadi Kabupaten. Kabupaten Bone memiliki lambang kabupaten yang menggambarkan karakteritisk masyarakat Bone pada umumnya. Adapun uraian tentang maksud dari lambang KabuptenBone diuraikan sebagai berikut.

Lambang Daerah Kabupaten Bone berbentuk perisai bersudut lima dengan dasar warna hijau kebiru-biruan yang terdri dari tujuh bagian yaitu :

a. Sisir (salaga) melambangkan bahwa salah satu dasar penghidupan penaghasilan rakyat daerah Bone bersumber pada pertanian untuk mencapai kehidupan yang layak. Cara menggunakan alat pertanian tersebut dengan sistem gotong royong memberikan kesan bahwa sarana penghidupan dan kehidupan rakyat Bone berdasarkan atas sistem gotong royong.
b. Jangkar melambangkan sifat kebaharian yang perkasa dari rakyat Bone seperti yang telah dibuktikan oleh sejarah perahu Elung Mangenre milik kerajaan Bone dengan Bendara Samparajae sebagai lambang kebesaran

kerajaan didalamnya terlukis gambar jangkar, sehingga dapat ditarik kesan bahwa sifat pelaut ini merupakan khas daripada penduduk Bone.

c. Timbangan pada tangkai lukisan jangkar sebelah menyebalah menandakan bahwa rakyat Bone dengan segala tindakan dan perbuatan serta pikiran pertimbangan yang waras. Timbangan inipun melambangkan keadilan dan kejujuran yang selalu merupakan pegangan dalam bertindak,
d. Keris terhunus melambangkan keberanian. Hal ini memberikan kesan bahwa rakyat Bone laksana prajurit yang gagah perkasa dalam membela kebenaran dan keadilan keris terhunus melambangkan kesiapsiagaan rakyat dalam segala hal.
e. Padi adalah pangan dan makanan pokok dari rakyat Bone. Ini berarti bahwa daerah Bone adalah daerah agraris.
f. Kapas adalah melambangkan sandang yang juga merupakan cita-cita perjuangan rakyat dalam memenuhi kebutuhan primernya.
g. Tulisan “Kabupaten Bone” sebagai manifestasi perwujudan nama daerah Bone. Tulisan ini berwarna merah yang melambangkan keberanian dalam mempertahankan kebenaran serta dalam segala cita dan karsanya tetap suci.

D. Sejarah singkat pemerintah Bone dan susunan raja-rajanya.

Kabupaten Bone pada awalnya sebelum menggabung dalam Republik Indonesia merupakan salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Dalam catatan sejarah Kerajaan Bone terdapat 33 orang raja yang memerintah Kabupaten Bone sebagaimana tampak dalam Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Nama Raja-Raja Bone, Tahun Memerintah dan Penguasa Berdasarkan Jenis Kelamin.

RAJA KE	NAMA DAN GELAR	TAHUN PEMERINTAH	JENIS KELAMIN
1.	ManurungE ri Matajang Mata SilompoE	± 1330 – 1365	Pria
2.	La Ummasa' Petta Panre BessiE	± 1365 – 1368	Pria
3.	La Saliu Karaeng Pelua	± 1368 – 1470	Pria
4	We Benrigau' MallajangE ri Cina	± 1470 – 1510	Wanita
5	La Tenri Sukki MappajkungE	± 1510 – 1535	Pria
6	La Ulio' BotaE MatinroE ri Itterung	± 1535 – 1560	Pria
7	La Tenri Rawe BongkangE MatinroE ri Guccina	± 1560 – 1564	Pria
8	La Icca' MatinroE ri Adenenna	± 1564 – 1565	Pria
9	La Pattawe MatinroE ri Bettung	± 1565 – 1602	Pria
10	I Tenri Tuppu MatinroE ri Sidenreng	± 1602 – 1611	Wanita
11	La Tenri Ruwa Sultan Adam MatinroE ri Bantaeng	± 1611 – 1616	Pria
12	La Tenri Pale MatinroE ri Tallo	± 1616 – 1631	Pria
13	La Maddaremmeng MatinroE ri Bukaka	± 1631 – 1644	Pria

14	La Tenri Waji Arung Awangpone Matinroe ri	± 1644 – 1645	Pria
15	La Tenri Tatta Daeng Serang Malampa'E Gemme'na Arung Palakka	± 1645 – 1696	Pria
16	La Patau Matanna Tikka MatinroE ri Nagauleng	± 1696 – 1714	Wanita
17	Batari Toja Sultan Zainab Zikiyahtuddin	± 1714 – 1715	Pria
18	La Padassajati To Appaware Sultan Sulaeman Petta ri JalloE	± 1715 – 1718	Pria
19	La Parepare To Sappewali Sultan Ismail MatinroE Ri Sombaopu	± 1718 – 1721	Pria
20	La Ponongi – To Pawawoi Arung Mampu Karaeng Bisei	± 1721 – 1724	Pria
21	Batari Toja Datu Talaga Arung Timurung	± 1724 – 1749	Wanita
22	La Temmassonge To Sappewali Sultan Abul Razak Matinroe ri Mallimongeng	± 1749 – 1775	Pria
23	La Tenri Tappu Sultan Ahmad Saleh Matinroe ri Rompegading	± 1775 – 1812	Pria
24	La Appatunru - Sultan Ismail Muhtajuddin MatinroE ri Lalabeta	± 1812 – 1823	Pria
25	I Mani Ratu Datu Sultan Rajituddin MatinroE ri Kessi	± 1823 – 1835	Wanita
26	La Mappaseling Sultan Adam Najamuddin MatinroE ri Salassa'na	± 1835 – 1845	Pria
27	La Parenrengi Sultan Akhmad Muhidin Arung Puji MatinroE ri Ajang Benteng	± 1845 – 1857	Pria

28	We Tenri Awaru Sultanah Ummulhuda Pancaitana - Besse MatinroE ri Majennang	± 1857 – 1860	Wanita
29	Akhmad Singkerukka Sultan Akhmad Idris MatinroE ri To Paccing	± 1860 – 1871	Pria
30	Fatimah Banri Datu Citta MatinroE ri Bolampare'na	± 1871 – 1895	Wanita
31	La Pawawoi Karaeng Sigeri MatinroE ri Bandung	± 1895 – 1805	Pria
32	La Mapanyukki Sultan Ibrahim MatinroE ri Gowa	± 1831 – 1846	Pria
33.	La Pabbenteng Pt. MatinroE ri Matuju	± 1831 – 1851	Pria

(Sumber : BPS, Kabupaten Bone, 2007.

Pada tahun 1905 Kerajaan Bone jatuh ke tangan penjajah dan terbentuk pemerintahan sendiri (Zel Bestur) dibawah pengawasan Belanda, berhubung karena sejak tertangkapnya Raja Bone La Pawawoi Karaeng Sigeri, Tahta Kerjaan Bone tidak terisi maka atas usaha Belanda pada tahun 1931 diangkat Lat Tenri Sukki (Andi Mappanyukki) putra dari La Makkulawu Karaeng Lembampareng Sombaya ri Gowa menjadi Raja Bone ke-32 (1931-1946). Oleh karena itu Raja Bone ke-32 tidak menerima keberadaan NICA maka pada awal tahun 1946 menarik diri dari tahta kerajaan dan digantikan oleh Raja Bone ke-33 Pabbenteng Petta MatinroE ri Matuju yang bertahta (1946-1951).

Selanjutnya sistem kerajaan berubah dan mengikuti sistem pemerintahan Republik Indonesia dan adapun nama-nama Pimpinan Daerah

yang memerintah Daerah Bone secara berurutan sebagaimana Tabel 2 berikutu :

Tabel 2 Nama-Nama Pemimpin Daerah Kabupaten Bone dan Masa Pemerintahannya

NO	NAMA	Masa Pemerintahan
1.	Abd. Rahman Daeng Mangung (kepala Afdeling)	Tahun 1951
2.	A. Pangerang Daeng Rani (Kepala Afdeling/Kepala Daerah)	Tahun 1951 – 1955
3.	Ma'mun Daeng Mattiro (Kepala Daerah)	Tahun 1955 – 1957
4.	H.A Mappanyuki Sultan Ibrahim MatinroE ri Gowa (Kepala Daerah/Raja Bone)	Tahun 1957 – 1960
5.	A. Suradi (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1960 – 1966
6.	A. Djamuddin (Pejabat Bupati Kelapa Daerah)	Tahun 1966 – 1966
7.	A. Tjatjo (Yang menjalankan tugas Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1966 – 1967
8.	A. Baso Amir (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1967 – 1969
9.	Suaib (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1969 – 1976
10.	H.P.B Harahap (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1976 – 1982
11.	H.A. Madeali (Pejabat Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1982 – 1983
12.	A. Syamsu Alam (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1983 – 1988
13.	A. Syamsoel Alam (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1988 – 1993
14.	A. Muhammad Amir (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1993 – 1998
15.	A. Muhammad Amir (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1998 – 2003
16	H.A Muh. Idris Galigo (Bupati Bone)	Tahun 2003 – Sekarang

(Sumber, BPS, Kab. Bone, 2007.)

Berdasarkan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 15 Pebruari 1990 ditetapkan Hari Jadi Bone pada tanggal 6 April 1330. dengan demikian Hari Ulang Tahun Bone ditetapkan pada tanggal 6 April.

Kabupaten Bone terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang diperinci menjadi 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) desa dan 39 (tiga puluh sembilan) kelurahan dengan jumlah dusun sebanyak 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) dan lingkungan sebanyak 121 (seratus dua puluh satu)

Wilayah Kecamatan **Bontocani** terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Kahu** terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Kejuara** terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Salomeko** terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Tonra** terdiri dari 11 desa. Kecamatan **Patimpeng** terdiri dari 10 desa. Kecamatan **Libureng** terdri dari 19 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Mare** terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Sibulue** terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **cina** terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Barebbo** terdiri dari 18 desa. Kecamatan **Ponre** terdiri dari 9 desa. Kecamatan **Lumutu** terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Tellu Limpoe** terdiri dari 11 desa. Kecamatan **Bengo** terdiri dari 9 desa. Kecamatan **Ulaweng** terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Palakka** terdiri dari 15 desa. Kecamatan

wangpone terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Tellu siattinge** terdiri dari 15 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan **Amali** terdiri dari 15 desa. Kecamatan **Ajangale** terdiri dari 14 desa. Kecamatan **dua Boccoe** terdiri dari 14 desa. Kecamatan **Dua Boccoe** terdiri dari 21 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **cenrana** terdiri dari 15 desa dan 1. Kelurahan **tanete Riattang Barat** terdiri dari 8 kelurahan. Kecamatan **Tanete Riattang** terdiri dari 8 kelurahan. Serta kecamatan **Tanete Riattang Timur** terdiri dari 8 kelurahan juga.

E. Keadaan geografis

1. Batas Wilayah (*Region Limit)*

Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten di pesisir Timur Propinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 km dari Kota Makassar dan mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah Selatan ke arah Utara. Secara astronomis terletak dalam posisi 4° 13'-5° 06' Lintang Selatan dan antara 119° 42' – 120040' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjal dan Gowa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.

2. Ketinggian Tempat

Daerah Kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 meter (tepi pantai) hingga lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. Ketinggian daerah digolongkan sebagai berikut :

- Ketinggian 0 – 25 meter seluas 81.925,2 Ha (17,97 %)
- Ketinggian 25 – 100 meter seluas 101.620 Ha (22,29 %)
- Ketinggian 100 – 250 meter seluas 202.237,2 Ha (44,36 %)
- Ketinggian 250 – 750 meter seluas 62,640,6 Ha (13,74 %)
- Ketinggian 750 meter keatas seluas 40.080 Ha (13,76 %)
- Ketinggian 1000 meter keatas seluas 6.900 Ha (1,52 %)

3. Kemiringan Lereng *(Slope of Mountain)*

Keadaan permukaan lahan bervariasi mulai dari landai, bergelombang hingga curam. Daerah landai dijumpai sepanjang pantai dan bagian Utara, sementara di bagian Barat dan Selatan umumnya bergelombang hingga curam, dengan rincian sebagai berikut :

4. Kemiringan lereng 0-2 % (datar) :164.602 Ha (36,1 %)
5. Kemiringan Lereng 0-15 % (landai & sedikit bergelombang) : 91.519 Ha (20,07 %)
6. Kemiringan lereng 15-40 % (bergelombang) : 12.399 Ha (24,65%)
7. Kemiringan lereng > 40 % (curam) : 12.399 Ha (24,65)

4. Kedalam Tanah (*Depth of Land)*

Kedalam efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu :

1. 0-30 cm seluas 120.505 Ha (26,44%)
2. 30-60 cm seluas 120.830 Ha (26,50%)
3. 60-90 cm seluas 30.825 Ha (6,76%)
4. Lebih dari 90 cm seluas 183.740 Ha (40, 30%)

5. Jenis Tanah *(Type of Land)*

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari tanah Aluvia *Gleyhumus,* Litosol, Regosol, Grumosol, Mediteran dan Renzina. Jenis tanaman didominasi oleh tanah Mediteran seluas 67,6% dari total wilayah, kemudian Renzina 9,59% dan Litosol 9 %. Penyebaran jenis tanahnya dapat jelaskan sebagai berikut : sepanjang Pantai Timur Teluk Bone ditemukan tanah Aluvial.

6. Iklim *(Climate)*

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 26^0C-43^0C. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone.

Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu Kecamatan Libureng dan Bontodani yang sebagian wilayahnya mengikuti wilayah Barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah Timur. Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Bone bervariasi

yaitu rata-rata <1750 mm, 1750 – 2000 mm, 2000 – 2500 mm dan 2500 – 3000 mm.

Pada wilayah Kabupaten Bone terdapat juga pegunungan dan perbukitan yang dan celah-celahnya terdapat aliran sungai. Di sekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisi sungai yang berair pada musim hujan kurang lebih 90 buah. Namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar seperti Sungai Walanae, Sungai Cenrana, Sungai Palakka, Sungai Jaling, Sungai Bulu-Bulu, Sungai Salomekko, Sungai Tobunne, Sungai Bengo dan Sungai Lekoballa.

F. Penduduk dan ketenagakerjaan

1. Penduduk *(Populasi)*

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan sebagaimana tertuang dalam GBHN. Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia seuntuhnya dari seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka memecahkan masalah kependudukan seperti Program Keluarga Berencana yang terbukti dapat menekankan laju pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Bone Tahun 2005 sebanyak 694.311 jiwa kemudian naik menjadi 696.712 pada tahun 2006 yang terdiri dari laki-laki 329.750 jiwa dan perempuan 366.962 jiwa dengan rasio jenis

kelamin 89,859. Ini berarti bahwa dalam seratus penduduk perempuan terdapat 90 penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk terbesar terletak di Kecamatan Tanete Riattang sebanyak 43.232 jiwa, disusul Kecamatan Tellu siattinge sebanyak 41.889 jiwa, kemudian Kecamatan Tanete Riattang Timur sebanyak 37.282 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Tonra sebanyak 11.484 jiwa, terus Kecamatan Tellu Limpoe sebanyak 12.953 jiwa, Kemudian Kecamatan Ponre sebesar 12.965 jiwa.

Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2002-2006 sebesar 1,4 persen pertahun. Laju pertumbuhan penduduk terbesar di Kecamatan Cenrana sekitar 3,03 persen per tahun, kemudian disusul Kecamatan Tanete Riattang Barat sebesar 2,69 persen per tahun, lalu Kecamatan Lamuru sebesar 2,32 persen pertahun.

Kepadatan penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2006 rata-rata 153 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk terbesar didominasi oleh Kecamatan Kota, yakni kecamatan Tanete Riattang sekitar 1.817 jiwa/km^2, disusul Kecamatan Tanete Riattang Timur sekitar 763 jiwa/km^2 lalu Kecamatan Tanete Riattang Barat sekitar 691 jiwa/km^2. sedangkan kepadatan penduduk terkecil jatuh pada kecamatan Bontocani sebesar 33 jiwa/km^2, disusul Kecamatan Tellu Limpoe sebesar 41 jiwa/km^2, kemudian

Kecamatan Ponre sebesar 44 jiwa/km^2. Hal ini dipicu oleh karena ketiga kecamatan tersebut merupakan daerah pegunungan di Kabupaten Bone.

2.Ketenagakerjaan (*Employment)*

Pada dasarnya penduduk dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni penduduk yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja dan penduduk kelompok bukan angkatan kerja. Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan jumlah dan komposisi ketenagakerjaan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Bagian dari tenaga kerja yang akan dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja.

Penduduk kelompok Angkatan Kerja adalah penduduk berumur 10 tahun keatas yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti yang sedang menunggu panenan dan pegawai yang cuti. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/mengharap dapat pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

Penduduk kelompok bukan angkatan kerja adalah penduduk berumur tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimaskkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

Pada tahun 2006 penduduk kabupaten Bone yang berumur 10 tahun keatas sebanyak 560526 jiwa, dan yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja sebanyak 319.620 jiwa.

Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu kuran yang sering digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi penduduk TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia 10 tahun ke atas. TPAK Kabupaten Bone pada tahun 2005 tercatat 47,19 persen. Angka ini hampir sama dibanding tahun 2004 yang hanya sebesar 47,04 persen.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan rasio antara pencari pekerja dan jumlah angkatan kerja. Dari seluruh angkatan kerja yang berjumlah 319620 jiwa tercatat bahwa 55.974 jiwa dalam status pengangguran. Dari angka tersebut dapat dihitung tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bone pada tahun 2005. yakni sebesar 6,99 persen. Sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Bone adalah laki-laki yang berjumlah 197.754 jiwa atau 61,87 persen dari total angkatan kerja.

Dilihat dari lapangan usaha sebagian besar penduduk Kabupaten Bone bekerja di sektor pertanian yang berjumlah 168.030 jiwa atau 63.73 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Sektor lain yang juga banyak menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor perdagangan (13,60 persen) dan jasa-jasa (10,73).

G. Sosial

1. Pendidikan *(Education)*

Masalah pendidikan di Kabupaten Bone adalah bagian integral dari sstem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan taqwa terhadap Tuhan YME, kecerdasan keterampilan, budi pekerti, kepribadian dan sangat kebangsaan sehingga dapat menumbuhkan manusia,manusia pembangunan yang mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Dalam rangka mencerdaskan bangsa serta meningkatkan persiapan sekolah, penduduk tentunya harus diimbagi dengan penyediaan sarana dan prasaran pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal.

Tabel 4.1.1 sampai tabel 4.1.13 memberikan gambaran yang jelas mengenai jumlah sekolah, murid, dan guru semala kurun waktu 2005-2006 pada seluruh jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi di Kabupaten Bone.

2. Kesehatan (*Healt)*

Kesehatan merupakan bagian yang terpenting dan diharapkan dapat menghasilkan derajat kesehatan yang lebih tinggi dan memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Pembangunan bidang kesehatan di kabupaten Bone diharapkan agar pelayanan kesehatan meningkat lebih luas lebih merata, terjangkau oleh lapisan masyarakat.

Penyediaan sarana pelayanan kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas dan tenaga kesehatan seyogyanya semakin ditingkatkan baik dari segi kuatitas maupun kualitas, seperti penyediaan obat-obatan, alat kesehatan, pemberantasan penyakit menular dan peningkatan penyuluhan dibidang kesehatan.

Adapun sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Bone pada tahun 2006 telah tersedia berupa Rumah Sakit sebanyak 2 buah, Puskesmas sebanyak 35 buah, Puskesmas Pembantu 67 dan Posyandu sebanyak 908 buah.

3. **Keluarga berencana** *(Family Planning)*

Salah satu usaha pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah menggalakkan program keluarga berencana. Untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Dalam mengendalikan kelahiran beberapa cara telah ditempuh antara lain melalui berbagai kampanye gerakan keluarga berencana dan secara langsung mengatur kelahiran dengan memanfaatkan alat kontrasepsi untuk pengaturan kehamilan.

Sasaran kebijaksanaan program keluarga berencana dalam rangka menurunkan tingkat kelahiran bayi. Dan diharapkan semua Pasangan Usia Subur (PUS) dapat menjadi peserta KB yang aktif.

Jumlah akseptor KB aktif di Kabupaten Bone tahun 2006 tercatat 58.951 orang, dimana 47,37 persen memakai pil, 530 persen memakai IUD, yang memakai kondom 2,34 persen, suntikan 36,49 persen dan sisanya 8,50 persen memakai alat kontrasepsi lainnya.

4. Agama *(Religion)*

Upaya pemenuhan sarana dan prasarana kehidupan beragama pada dasarnya merupakan tanggug jawab masyarakat, karena pemerintah juga mempunyai tanggung jawab atas pembinaan kehidupan beragama dalam masyarakat, maka pemerintah telah memerikan bantuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut.

Dalam menjalankan ajaran agama masing-masing tentunya harus ditunjang dengan adanya sarana peribadatan seperti mesjid, mushalla, gereja, dan sebagainya.

Adapun saran peribadatan di Kabupaten Bone pada tahun 2006 sebanyak 1.054 yang terdiri dari mesjid 991 buah, mushola 59 buah, gereja 3 buah dan pundi 1 buah.

Pada tahun 2005 jumalh jemaah haji Kabupaten Bone tercatat sebanyak 1.284 orang, dan pada tahun 2006 turun menjadi 700 orang atua mengalami penurunan sebesar 45,48 persen.

5. Kriminal (*Crime*)

Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu pendorong proses pembangunan. Terjadinya masalah kriminalitas kemudian disebabkan antara

lain karena pertambahan penduduk dan banyaknya pengangguran. Kedua hal tersebut akan menimbulkan kerawanan sosial karena para penganggur dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka timbul keinginan untuk melakukan tingkat kejahatan berupa pencurian, pembunuhan dan lain-lain.

Statistik peristiwa kejahatan masih terbatas, data yang diperoleh hanya pada gangguan kejahatan yang dilaporkan pada Polres Bone. Adapun jumlah peristiwa kejahatan termasuk kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan pada tahun 2006 tercatat 304 peristwa dan diselesaikan sebanyak 250 peristiwa.

Selanjutnya jumalah kecelakaan lalu lintas sebanyak 91 peristiwa yang menyebabkan meninggal dunia sebanyak 76 orang, luka berat 44 orang, luka ringan 35 orang kemudian kerugian materi sebesar Rp. 227.150.000,-

H. Pertanian

1. **Pertanian Tanaman Pangan** (Food Crops)

Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan produktivitas dan kualitas tanaman pangan. Pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan diarahkan untuk meningkatkan produksi padi, palawija dan hortikultura. Peningkatan produksi padi dilakukan melalui program dalam bentuk insus dan inmum serta ditunjang dengan pencetakan sawah baru dan peralatan yang memadai.

Secara umum perekonomian daerah kabupaten Bone didominasi sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan, selanjutnya sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan

Luas panen tanaman padi di Kabupaten Bone akhir tahun 2006 sebesar 109.751 hektar sedangkan produksnya tercatat 548.797 ton gabah kering giling atau rata-rata produksi 5 ton/hektar.

Luas panen tanaman palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedele dan kacang hijau) pada tahun 2006 selus 55.616 hektar dengan jumlah produksi tercatat 138.154 ton (lihat tabel 5.1.2-tabel 5.1.7).

2. Perkebunan (*Estate Crops)*

Usaha pokok yang ditempuh dalam pembangunan tanaman perkebunan adalah intensifikasi, rehabilitas dan ekstensifikasi. Tanaman perkebunan di Kabupaten Bone termasuk banyak namun yang termasuk dalam komoditi andalan tahun 2006 (produksi yang relatif banyak dari beberapa komoditi yang ada di Kabupaten Bone) antara lain coklat 15.458 ton, kelapa 10.597 ton, tebu 25.710 ton, kemiri 6.052 ton, dan cengkeh 1.684 ton.

3. Kehutanan (*Forestry*)

Hutan sebagai sumber daya alam adalah merupakan modal kekayaan bangsa yang mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia

dan mahluk hidup lainnya. Karena hutan juga berfungsi sebagai daerah penyangga terutama sangat berperan dalam menjaga kelestarian sumber air dan lingkungan hidup. Dengan demikian hutan perlu dilindungi, dikelola atau dimanfaatkan dengan baik untuk kemakmuran rakyat sekaligus dijaga kelestariannya, tentunya dengan melakukan usaha seperti reboisasi dan penghijauan bagi hutan/tanah yang nampak mulai gundul. Pada tahun 2006 luas areal reboisasi 700 hektar sedangkan luas areal penghijaun 150 hektar.

4. **Peternakan** (*Animal Husbandry*)

Sumber protein yang utama bagi manusia berasal dari protein hewani termasuk ikan. Keberhasilan sub sektor peternakan dapat dilihat melalui indikator naik turunnya populasi ternak dan unggas.

Populasi ternak besar di Kabupaten Bone selama kurun waktu tahun 2005-2006 mengalami peningkatan yaitu populasi ternak besar (sapi, kerbau, kuda, dan kambing) pada tahun 2005 tercatat 134.137 ekor, naik menjadi 156.433 ekor pada tahun 2006 atau naik sekitar 12,25 persen. Sedangkan ternak unggas (ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buran dan itik) pada tahun 2005 populasinya sebesar 1.543.875 ekor, turun menjadi 1.538.672 ekor pada tahun 2006 atau turun sekitar 0,33 persen.

5. **Perikanan** (*Fishery*)

Kabupaten Bone terletak di pinggir pantai yang berpotensi terhadap sub sektor perikanan, khususnya penangkapan ikan di laut. Pada sub sektor

perikanan laut jumlah perahu tanpa motor dan perahu pakai motor penangkap ikan pada tahun 2006 masing-masing tercatat 699 buah dan 2.382 buah. Untuk sub sektor perikanan darat menurut jenis pemeliharaan meliputi tambak dan kolam masing-masing luasnya tercatat sebesar 15.244 hektar dan 1.970 hektar.

I.Transportasi, Komunikasi dan Pariwisata

1. Perhubungan (*Transportation*)

Perkembangan sarana dan prasarana perhubungan, baik langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh pada perkembangan kehidupan sosial ekonomi suatu wilayah, demikian juga sebaliknya. Oleh karenanya perhubungan menjadi penting karena akan memperlancar arus penumpang, barang dan jasa.

Di Kabupaten Bone kebijaksanaan pembangunan transportasi diarahkan untuk berperan sebagai urat nadi kehidupan perekonomian daerah dan sekaligus menunjang mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pengembangan wilayah dan hubungan antara daerah sekaligus membuka daerah yang masih terisolasi.

Panjang jalan nasional di Kabupaten Bone pada tahun 2005 adalah 156,350 km sedang tahun 2006 menjadi 208, 650 km atau meningkat sekitar 33,45 persen. Panjang jalan propinsi mengalami peningkatan sekitar 10,81

persen dari 119,315 km pada tahun 2005 menjadi 132,220 km pada tahun 2006.

Angkutan laut merupakan salah satu sarana vital bagi perekonomian Kabupaten Bone. Di Kabupaten Bone terdapat 8 pelabuhan. Salah satu dantaranya adalah pelabuhan penyebarangan Bajoe merupakan pelabuhan nasional. Dua pelabuhan regional, 4 pelabuhan lokal dan satu pelabuhan rakyat yang belum terdaftar.

2. Pos dan Telekomunikasi *(Pos and Telecommunication)*

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pos dan telekomunikasi baik pemerintah maupun swasta, pembangunan komunikasi sarana dan prasarana pengiriman dan penyampaian berita yang cepat, aman dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Berbagai saran pos dan telekomunikasi telah dikembangkan antara lain tersedianya kantor pos, telepon dan telegram.

Lalu lintas surat pos yang dikirim di dalam negeri pada tahun 2006 tercatat 107.220 dan yang dikirim ke luar negeri tercatat 6.844. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2005. Pada tahun 2005 tercatat yang dikrim d dalam negeri 66.856 dan keluar negeri 3.209. sedangkan lalulintas surat pos yang di diterima di dalam negeri pada tahun 2005 tercatat 94.152 dan keluar negeri sebesar 2.068 kemudian naik menjadi 234.540 dan 15.856 pada tahun 2006.

Dewasa ini sambungan induk telepon di Kabupaten Bone mengalami stagnasi. Peningkatan pesat terjadi pada telepon seluler. Pada tahun 2007 seluruh kecamatan di Kabupaten Bone sudah dijangkau jaringan telepon seluler.

3. **Hotel dan Pariwisata** *(Hotel and Tourism)*

Sektor pariwisata dewasa ini semakin penting karena merupakan sumber devisa bagi negara, merangsang perekonomian daerah (sumber penghasilan daerah) serta menciptakan lapangan kerja.

Untuk menunjang pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Bone tidak ketinggal di dalam mengembangkan obyek-obyek wisatanya walaupun daerah ini belum ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata di Propinsi Sulawesi Selatan. Tercatat beberapa obyek wisata di Kabupaten Bone baik obyek wisata alam maupun obyek wisata budaya. Untuk menunjang kegiatan pariwisata tersebut di Kabupaten Bone terdapat 19 hotel/penginapan dengan jumlah kamar 264 dan 390 tempat tidur. Dan diharapakan penginapan tersebut bisa menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara untuk datang di Kabupaten Bone.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Antropologi-Sosial

Antropologi sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang kebudayaan manusia pada umumnya. Ilmu ini dalam perkembangannya, sampai saat ini memasuki fase keempat (sesudah kira-kira 1930) memunculkan berbagai cabang-cabang antropologi sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan manusia itu sendiri. Pada periode ini menurut Koentjaraningrat memasuki fase yang sangat luas karena bertambahnya bahan pengetahuan yang lebih teliti dan ketajaman metode-metode ilmiahnya[28]. Meskipun ilmu ini berkembang secara pesat setiap tahun, namun ilmu antrolopologi orientasi utamanya ada dua yaitu. Pertama, tujuan akademikal adalah mencari pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka wama bentuk-bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaannya. Kedua, tujuan praktisnya adalah mempelajari manusia dalam aneka warna masyarakat suku bangsa guna membangun masyarakat suku-bangsa itu[29]. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut membutuhkan keahlian-keahlian khusus yang dalam perkembangan

[28] Op.cit Kuntjaraningraat, hal. 5.
[29] Ibid Kuntjaraningraat, hal. 6.

ilmu antropologi telah muncul cabang-cabangnya, salah satu diantaranya adalah antropologi-sosial.

Antropologi-sosial sebagai salah satu cabang antropologi menfokuskan diri pada praktek atau interaksi sosial dari gagasan-gagasan, ide-ide, kepercayaan-kepercayaan atau simbol-simbol dari suatu kebudayaan masyarakat. Pengertian dan pemahaman terhadap makna antropologi-sosial lebih awal perlu dikemukakan agar terdapat kesepakatan (paradigma) tentang bidang kajian yang dikembangkan dalam disertasi ini. Selain itu, penyatuan pemahaman akan memudahkan penulis untuk mengaitkan berbagai dimensi sistem kekerbatan yang secara teoretis memasuki semua bidang kehidupan umat manusia baik dalam bentuk –gagasan-gagasan, ide-ide, kepercayaan-kepercayaan, simbol-simbol dari suatu kebudayaan. Karena itu, dalam beberapa uraian berikut akan dikemukakan asas-asas, prinsip-prinsip pokok kajian antropologis-sosial yang dikemukan beberapa ahli dan korelasinya dengan berbagai teori-teor sosial yang relevan dengan objek kajian. Bahkan, dalam bab ini akan diajukan *grand theory* yang menjadi “pisau analisis” dan beberapa teori-teori pendukungnya.

1. Asal Mula Sistem Kekerabatan Masyarakat Manusia

G.A. Wilken yang mempopulerkan teori tentang asal mula sistem kekebaratan masyarakat manusia ditempatkan sebagai ”*grand theory*” untuk menganalisis semua dimensi antropologi-sosial dalam hal perkawinan sebagai cara pembentukan dan pengembangan sistem kekerabatan

masyarakat manusia. Dalam kaitan dengan itu, pembicaraan tentang sistem kekerabatan sebagai salah satu produk kebudayaan masyarakat tertentu merupakan suatu pola atau simbol suatu kebudayaan masyarakat yang dilestarikan oleh penganutnya. Bahkan, jika dianalisis dari catatan sejarah asal mula kehidupan manusia, sebagaimana dikemukakan oleh G.A. Wilken[30] tampak bahwa asal –usul manusia, munculnya sistem kekerabatan sebagai produk budaya manusia dapat dilacak dari gagasan teorinya tentang empat fase evolusi perkembangan masyarakat manusia yaitu, pertama fase *promiscuiteit*, fase *matriarchaat*, fase *patriarchaat* dan fase *parental*. Asumsi dasar teori ini, dan sekaligus menjadi asumsi global semua pekembangan masyarakat manusia bahwa semua bangsa di muka bumi ini, masyarakat manusia itu berkembang melalui empat tingkatan tertentu[31]. Adapun deskripsi teoretis perkembangan masyarakat manusia pada empat fase tersebut tampak dalam Gambar 1 berikut :

[30] Lihat teori G.A. Wilken salah seorang tokoh, ilmua antropologi budaya nyang membahas tentang dasar-dasar evolusi masyarakat manusia berjudul " *handleiding voor de vergelijkende volkenkunde van Nederlansch-Indie*" yang merupakan kombinasi dari teori-teori yang pernah diajukam oleh J.J. Bachofen, J. Lubbock, J.F. McLennam, L. H. Morgan, dan G.Teulon.

[31] Koentjaranigrat, dalam buku berjudul " Metode2 Antropologi Dalam Penyeledikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia, sebuah ikhtisar, Penerbit Universitas, Cet. Ketiga, Djakarta, 1961, Hal. 70-71.

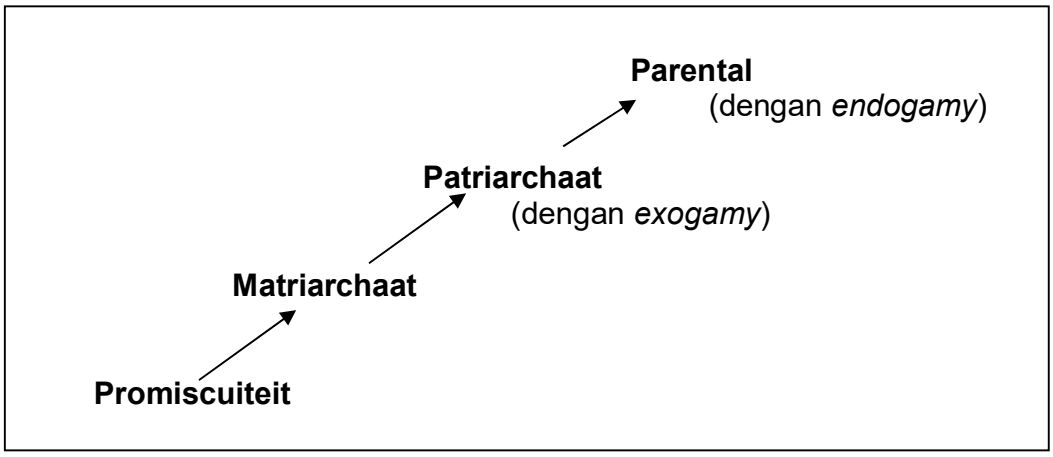

Grand disain masyarakat manusia yang ditampilkan dalam gambar tersebut menunjukkan suatu garis evolusi suatu kehidupan masyarakat manusia. Pada fase pertama, *fase **promiscuiteit***, masyarakat manusia hidup serupa dengan binatang berkelompok. Laki laki dan perempuan bersetubuh dan melahirkan keturunannya tanpa ikatan. Kelompok kekerabatan, seperti, batih atau nuclear familiy sebagai inti masyarakat waktu belum ada. Fase ini diniliai oleh Wilken sebagai tingkat pertama dalam proses perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia. Selanjutnya, lambat laun manusia sebagai makhluk sosial, menyadari bahwa terdapat hubungan antara ibu dengan anak-anaknya sebagai suatu kelompok keluarga inti dalam masyarakat. Fakta ini, oleh G.A Wilken memunculkan konsep bahwa anak-anak dalam keluarga inti hanya mengenal ibunya dan tidak mengenal ayahnya. Konsekuensinya, ibulah yang menjadi kepala keluarga yang dalam

teori Wilken disebut sebagai ***matriarchaat*.** Konsep ini melahirkan nilai baru (norma) bahwa seorang anak tidak diperkenankan kawin dengan ibunya, sehinga dari norma ini menimbulkan konsep perkawinan di luar keluarga atau dalam bahasa Wilken sebagai *'exogamy*'. Para ahli antropologi menyepakai bahwa konsep perkawinan ke luar dari inti keluarga merupakan fase kedua dari perkembangan kebudayaan masyarakat manusia [32]. Selanjutnya tingkat kedua dari perkembangan sistem kekerabatan masyarakat manusia pada tahap berikutnya yaitu tahap *patriarchat*. Pada fase ini terjadi karena para laki-laki tak puas dengan keadaan ini, Mula mula para laki-laki mengambil calon istri dari kelompok lain dan membawa gadis-gadis itu kepada kelompok mereka sendiri, seingga keturunan yang dilahirkan mereka juga tetap tinggal dalam kelompok mereka si laki-laki. Kejadian ini menyebabkan proses selanjutnya timbul suatu kelompok keluarga berdasarkan kerturunan berdasarkan ayah sebagai ketua dan dengan meluasnya pola ini sehingga menimbulkan sistem kekerabatan sendiri berdasarkan *patriarchaat*. Para ahli antropologi-sosial memposisikan sistem kekerabatan ini sebagai fase ketiga dari perkembangan masyarakat manusia. Fase terakhir, ketika terjadi perkawinan diluar kelompok yang disebut sebagai perkawinan exogami. Perubahan sistem ini dari endogami menurut G.A. Wilken disebabkan karena

[32] Ibid, Hal. 70.

berbagai sebab [33]. Perkawinan dalam batas-batas kelompok, menyebabkan bahwa sekurang-kurangnya anak-anak berhubungan langsung didalam waktu seluruh hidupanya manusia dengan anggota keluarga ayah dan ibu yang prosesnya begitu lama sehingga lama-kelamaan sistem kekerabatan *patriachaat* menjadi lentur sehingga sistem kekerabatan mamasuki fase keempat yang oleh G.A. Wilken disebut sebagai sistem kekerabatan berdasarkan *parental* atau endogami.

Berdasarkan gambaran teoretis tentang evolusi perkembangan munculnya sistem kekerabatan umat manusia tersebut merupakan landasan teoretis untuk menemukan dan menentukan status kekerabatan seseorang dalam masyarakat. Dalam persfektif antropologi-sosial, asumsi teoretis perubahan dan dianutnya suatu sistem kekerabaran masyarakat manusia tersebut ditentukan oleh interaksi sosial (tindakan nyata) dari seseorang dalam kelompoknya, tidak hanya dalam bentuk gagasan-gagasan, ide-ide, akan tetapi lebih tampak ketika seseorang berprilaku. Penentuan prilaku-prilaku seseorang dalam bertindak merupakan simbol tentang apa yang menjadi kehendaknya. Oleh karena itu, penggunaan teori ini sangat relevan menjadi ”*grand theory*” untuk mendeskripsikan pembentukan dan penemuan

[33] Sebab-sebab perubahan tidak dijelaskan secara tegas oleh G.A. Wilken dalam teorinya sebagaimana tulisannya sejak ditulis tahun 1883. Bahkan, dalam tulisan Kuntjaranigraat, khususnya fase pertama, fase promiskuitas perkembangan masyarakat manusia hanya merupakan imajinasi para ilmuan dengan membandingkannya dengan kumunitas hewan yang hidup dalam kawanan. Kehidupan manusia tahap tersebut tidak akan pernah ditemukan (dikutipd ari buku Koentjaranigrat berjudul “ Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi II, Rineka Cipta, Cet. Kelima, 2005, Hal. 87.

pola-pola sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu komunitas masyarakat manusia.

2. Kebudayaan : Perspektif Antropologi-Sosial

Kata kebudayaan berasal dari kata Sangsekerta *buddhayah*, yaitu jamak dari *buddhi* yang berarti "budi" atau "akal'. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan : hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Kemudian secara tegas Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar[34].

Uraian tersebut mendeskripsikan bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah "kebudayaan" karena hanya sedikit tindakan manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang tidak terbiasakan dengan belajar. Beberapa ahli antropologi, seperti C. Wisier, (1916) *Psychological and Historical Interpretations for culture,* C. Klickhon (1941) *Patterning as Examplified is Navaho Culture, Language, Culture and Pesonality*, A. Davis (1948) *Social Class Influmces Upon Learning*, dan Hoebel (1958) *Man in the Primitive World. An Introduction to Antropology*, juga menganggap kebudayaan dan tindakan kebudayaan itu adalah segala tindakan yang harus dibiasakan oleh manusia dengan belajar (*learned behavior*). Dalam persfektif antropologi-sosial beberapa teori tentang kebudayaan tersebut merangkum

[34] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Rineka Cipta, 1981, hal.180

asumsi besar bahwa antara kebudayaan sebagai kumpulan gagasan, ide-ide, kepercayaan-kepercayaan manusia tidak dapat dilepaskan dari aksi-aksi (tindakan sosial) dari apa yang menjadi landasan manusia berfikir sebagai hasil dalam setiap kebudayaan manusia. Semua hasil pemikiran manusia (produk kebudayaan) akan selalu sampai pada tahap aksi atau tidakan sosial. Tindakan-tindakan manusia, misalnya, perkawinan, dalam prosesnya ditemukan berbagai tindakan yang berkorelasi dengan ide-ide, gagasan-gagasan dan kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh suatu komunitas keluarga. Realisasi dari semua tindakan dalam perkawinan, merupakan suatu simbol dari suatu pola tertentu yang dalam penelitian ini disebut sebagai sistem kekerabatan. Oleh sebab itu, dalam antropologi sosial, secara teoretis merupakan perpaduan konsep-konsep kebudayaan sebagai kumpulan ide-ide, gagasan-gagasan, kepercayaan-kepercayaan manusia dengan perbuatan nyata (tindakan sosial) sebagai simbol dari suatu kebudayaan. Dalan kaitan itulah dibutuhkan teori-teori pendukung, khususnya teori-teori tindakan sosial (*social action*) yang menjadi media untuk mendeskripsikan segala produk kebudayaan manusia, khususnya dalam kaitannya dengan sistem kekerabatan.

Ralph Linton yang terkenal dengan melihat kebudayaan sebagai latar belakang individu mendefinsikan kebudayaan sebagai berikut :

> “ Seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang mana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan. Dalam arti cara

> hidup masyarakat itu kalau kebudayaan diterapkan pada cara hidup kita sendiri, maka tidak ada sangkut pautnya dengan main piano atau membaca karya sastrawan terkenal. Untuk seorang ahli ilmu sosial. kegiatan seperti main piano itu. merupakan elemen-elemen belaka dalam keseluruhan kebudayaan kita. Keseluruhan ini mencakup kegiatan-kegiatan duniawi seperti, mencuci piring atau menyetir mobil dan untuk tujuan mempelajari kebudayaan. hal ini sama derajatnya dengan "hal-hal yang lebih halus dalam kehidupan". Karena itu. bagi seorang ahli ilmu sosial tidak ada masyarakat atau perorangan yang tidak berkebudayaan. Tiap masyarakat mempunyai kebudayaan. bagaimanapun sederhananya kebudayaan itu dan setiap manusia adalah mahluk berbudaya dalam arti mengambil bagian dalam sesuatu kebudayaan"[35].

Definisi tentang kebudayaan tersebut menunjuk pada berbagai aspek kehidupan. Kata itu meliputi cara-cara berlaku. kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Dalam persfektif antropologi – sosial, khususnya dalam sistem kekerabatan, teori ini mengusung suatu asumsi teoretis bahwa setiap produk kebudayaan manusia selalu dilatar belakangi oleh kemampuan seseorang untuk memahami segala sesuatu sebagai hasil dari produk kebudayaan kelompoknya sendiri. Produk kelompoknya sendiri dapat berupa, tanda-tanda kultural, seperti, mitologi, ritual, peraturan kekerabatan, dsb [36]. Konsep ini sesuai dengan asumsi teori *The elementary Systems of Kinship* dari Levi-Strauss. Bahkan, menurut Levi-Strauss bahwa " sistem kekerabatan sangat dipengaruhi oleh segi historis,

---

[35] Dikutip dalam buku Ihroni, op.cit. 1980, hal.18.

[36] Dapat dilhat dalam Buku Peter Beillhars berjudul " ***Social Theory : A Guide to Central Thinkers***" yang diterjemahkan oleh Sigit Jatmiko menjadi " Teori-Teori Sosial, Obsevarsi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka, Pustaka Pelajar, Cet. Ketiga, Yogyakarta, 2003, Hal. 261.

demografis serta kendala lainnya”[37]. Padangan C. Levi-Strauss tersebut membuktikan bahwa pembentukan dan pelestarian suatu sistem kekerabatan umat manusia tidak dapat dilepaskan dari faktor sistem kultural masyarakatnya sendiri.

Napoleon Chagnon (1968: 84) memberi penegasan kebudayaan dengan mencontohkan Indian Yamonamo dari perbatasan Venezuela Brasilia mempunyai adat tertentu yang kemungkinan besar akan dinilai secara negatif oleh kebanyakan orang, hanya karena adat itu tidak sesuai dengan gagasan kebanyakan orang tentang cara berlaku wajar bagi anak-anak. Bila putra-putri Yamonamo marah pada orang tuanya dianjurkan untuk menyatakan kemarahan itu dengan menempeleng kepalanya bukannya dihukum malahan dipuji. Pada umur empat tahun, sebagian besar anak laki-laki telah tahu, bahwa cara yang sudah dimaklumi bersama dan disetujui, untuk menunjukkan kemarahan dalam masyarakat mereka adalah dengan memukul orang.

Selanjutnya, adat yang demikian tidak diterima sebagian besar masyarakat. Karena penggunaan kekerasan fisik dalam hubungan antar manusia di larang. Adat demikian melanggar sistem sikap, nilai-nilai dan prilaku yang dimiliki sebagian besar masyarakat. Karena itu, seperti hanya semua konsep-konsep ilmiah, konsep kebudayaan berhubungan dengan beberapa aspek “di luar sana” yang hendak diteliti oleh seorang ilmuwan.

[37] Ibid.

Konsep-konsep kebudayaan yang dibuat membantu peneliti dalam melakukan pekerjaannya sehingga ia tahu apa yang harus dipelajari. Tingkah laku pada binatang sudah terprogram dalam gen mereka yang berubah secara sangat lambat dalam mengikuti perubahan lingkungan di sekitamya. Perubahan tingkah laku lebah akhirnya harus menunggu perubahan dalam gennya. Berbeda dengan manusia, tingkah laku manusia sangat fleksibel. Hal ini terjadi karena kemampuan yang luar biasa dari manusia untuk belajar dari pengalamannya. Benar bahwa manusia tidak terlalu istimewa dalam belajar karena mahluk lainnya pun ada yang mampu belajar, tetapi kemampuan belajar dari manusia sangat luar-biasa dan hal lain yang juga sangat penting adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan apa yang telah dipelajari itu.

Uraian tentang pengertian dan makna kebudayaan tersebut memberikan arah kepada pembentukan asumsi-asumsi teortis bahwa suatu kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari aktivitas kehidupan manusia. Suatu kebudyaan baru dapat dikenal sebagai suatu wujud kebudayaan ketika berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kaitan itu, konsep kebudayaan dalam persfektif antropologi-sosial memberi suatu makna spesifik dari suatu kebudayaan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya hidup dalam arti hanya menggunakan ide-ide, atau gagasan-gasannya sendri, akan tetapi ide-ide, gagasan-gasan, kepercayaan-

percayaan yang dimiliki suatu kmunitas yang dikomunikasikan setiap orang secara simbolik baik melalui bahasa (ucapan) dan perilaku (perbuatan).

3. Wujud Kebudayaan

Baik Talcoot Parsons maupun A.L. Kroeber[38] membedakan secara tajam wujud kebudayaan sebagai suatu sistem ide-ide dan konsep-konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian berpola. Hal yang sama dengan J.J Honigman (1959) *The World of Man,* membedakan adanya tiga gejala kebudayaan, yaitu (1) *ideas,* (2) *activities,* (3) *artifacts*. Kemudian Koentjaraningrat (1981: 187) juga membagi wujud kebudayaan atas tiga, yaitu (1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, (2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dan masyarakat, (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia [39].

Dalam persfektif antropologi- sosial wujud kebudayaan manusia pada prinsipnya merupakan perwujudan dari semua konsep manusia yang terealisasi dalam tindakan sosial baik yang bersumber diri dalam diri dan lingkungannya. Hubungan antara diri sendiri dan lingkungan dalam beriteraksi ditentukan oleh proses-proses sosialisasi dari semua kebudayaan manusia. Asumsi ini diperoleh dari teori adanya pengaruh antara manusia

[38] Koentjaraningrat, op.cit, hal. 186.
[39] Ibid, hal. 187

dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya[40]. Bahkan, korelasi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu realitas yang sulit dibantah. Adanya saling pengaruh manusia dengan lingkungan dalam antropologi menjadikan bidang studi ini mendekati wujud kesempumaannya sebagai suatu ilmu (*science*). Sebab, selama ini ada anggapan bahwa antropologi bukan sebagai ilmu dan juga tidak jelas posisinya dalam jajaran ilmu pengetahuan[41]. Padahal jika dilihat perkembangan antropologi sampai dewasa ini menunjukkan adanya menuju proses multidisiplin, dimana studi ini merupakan studi komprehensif tentang kebudayaan masyarakat manusia terhadap pada semua tahap kehidupannya. Sebagian ilmuan antropologi yakin bahwa antropologi mencakup ciri-ciri ilmu fisika, ilmu-ilmu sosial, dan humanitas sekaligus. Bahkan, antropologi membawa pandangan integratif, penyatuan, untuk membahas kondisi manusia[42]. Dalam kaitan itu, wujud kebudayaan, khususnya yang berhubungan dengan sistem kekerabatan memiliki ragam wujud realitasnyanya. Misalnya, wujud kebudayaan dalam bentuk mas kawin dalam suatu perkawinan, merupakan suatu simbol yang memiliki makna yang terkait banyak di dalamnya dengan sistem kekerabatan. Makna terkait yang dimaksud dapat berupa ide-ide, atau gagasan-gagasan

---

[40]Dapat ditelusuri dari tulisan Abu Hamid tentang “Aspek-Aspek Kebudayaan dalam Lingkungan hidup; Suatu pendekatan Ekologis Manusia, Penerbit HUMAN- IKA PRESS Fisipol UNHAS,Cet. Pertama, 1990, Hal.2.

[41] Fenomena ini dapat dilihat dalam karya “ Achmad Feyani Saifuddin, berjudul ” *Antropologi Kontemporer : Suatu Pengantar Krisis Mengenai Paradigma*”, Penerbit Kencana, Cet. Kedua, 2006, Jakarta, Hal. 13-16.

[42] Pernyataan ini menunjukkan komprehensif dari pendekatan dan metode antropologi dalam mendeskripsikan realitas kebudayaan manusia secara utuh.

atau kepercayaan yang terbentuk secara kultural dalam suatu komunitas tertentu. Wujud kebudayaan demikian oleh Hans J. Daeng sebagai simbolisasi dari komunikasi yang terjalin antara keluarga luas dari pihak-pihak bersangkutan. Selain itu, wujud kebudayaan ini mendeskripsikan bahwa dua insan yang akan disatukan tunduk pada keputusan keputusan yang muncul dari komunitas tersebut [43]. Bahkan, menurut G.A. Wilken bahwa mas kawin merupakan wujud kebudayaan dalam sistem kekerabatan; sebagai suatu survival dari masa peralihan antara masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matriarkat ke sistem kekerabatan yang patriarkat[44]. Wujud kebudayaan tersebut merupakan pola tertentu yang bagi masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut menjadi acuan atau patokan yang harus dilaksanakan, meskipun maknanya dapat bervariasi sesuai dengan adat istiadat setempat.

4. Pola Kebudayaan Ideal dan Pola Kelakuan Sebenarnya

Dalam tiap-tiap masyarakat dikembangkan serentetan pola-pola budaya ideal dan pola-pola itu cenderung diperkuat dengan adanya pembatasan-pembatasan kebudayaan. Pola-pola budaya yang ideal itu memuat, seperti hal-hal yang oleh sebagian besar dari suatu masyarakat,

---

[43] Pernyataan Hans J. Daeng ini menegaskan bahwa setiap orang dalam bertindak tidak dapat dilepaskan dari lingkungan komunitasnya. Hal ini dikutip dari buku Hans J. Daeng berjudul " Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan:Tinjauan Antropologis, Pustaka Pelajar, Ce. Pertama, Yogyakarta, 2000, Hal.

[44] Menurut G.A. Wilken bahwa penggunaan istilah patriarkat dan matriarkat sudah ditinggalkan dan orang lebih banyak menggunakan istilah patrilineal dan matrilinea, ibid, Hal.4

diakui sebagai kewajiban yang harus dilakukannya dalam keadaan-keadaan tertentu. Pola-pola ideal seperti itu sering disebut norma-norma[45]. Namun, orang tidak selalu berbuat sesuai dengan patokan-patokan yang mereka akui. Andaikata para warga masyarakat memang selalu mengikuti norma, maka tidak perlu ada pembatasan-pembatasan langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, sebagian dari pola-pola ideal berbeda dari perilaku sebenamya, sebab, yang ideal itu dikesampingkan oleh cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat. Pola-pola ideal yang lain mungkin belum pernah menjadi pola kelakuan yang diikuti dan karena itu mungkin hanya menggambarkan apa yang dilakukan oleh warga masyarakat.

Kebudayaan ideal tidak semua dapat diterapkan oleh masyarakat, karena dalam setiap masyarakat terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kebudayaan ideal tersebut. Apa yang dilakukan oleh masyarakat itu merupakan kebudayaan yang riil atau sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam persfektif antropologi-sosial, pertumbuhan dan keberlangsungan kebudayaan ideal dan pola-polanya ditentukan melalui suatu tatanan nilai kebudayaan tertentu yang selalu dipertahankan. Dalam teori antropologi ditemukan konsep tentang warisan sosial manusia[46]. Warisan sosial manusia dimaksud adalah kebudayaan yang membimbing manusia untuk

---

[45] Op.cit Ihroni, 1981: 27)

[46] Konsep ini dikemukaka oleh Ralph Linton dalam bukunya berjudul " *The Study of Man*" yang diterjemahkan oleh Firmansyah berjudul "Antropologi: Suatu Penyelidikan Tentang Manusia" Penerbit Jemmars, Bandung, Cet, Pertama, 1984. Hal. 110.

menyesuaikan diri kepada alam sekitarnya. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa manusia dalam kehidupan bermasyarakat merupakan satu kesatuan utama (*primary unit*) yang di dalamnya terdapat pertarungan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan bukannya individu. Dalam kaitan dengan sistem kekerabatan, maka perkawinan dengan segala simbol-simbol kulturalnya pada hakikatnya merupakan pertarungan untuk melestarikan sistem kekerabatan tertentu dari totalitas sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyaralat. Selain itu, pelestarian melalui proses-proses pertarungan tersebut merupakan wujud dari upaya suatu komunitas tertentu untuk merealisasikan pola-pola ideal dari suatu sistem kekerabatan kelompoknya. Upaya ini dalam kajian antropologi disebut pula sebagai energi budi manusia yang tidak kenal diam – *the restless energy of teh human mind* dalam konsep antropologi versi Ralph Linton[47]. Karena itu, pola-pola ideal tersebut merupakan warisan sosial manusia dari komunitasnya yang harus dipertahankan secara turun temurun berdasarkan adat istiadatnya.

5. Kebudayaan Sebagai Proses Belajar

Dalam diri manusia, tingkah-laku ini ditentukan dalam proses pembelajaran. Apa yang mereka lakukan adalah hasil dari proses belajar yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya disadari atau tidak. Mereka mempelajari bagaimana bertingkah-laku ini dengan cara mencontoh

[47] Ibid, Hal. 112.

atau belajar dari generasi diatasnya dan juga dari lingkungan alam dan sosial yang ada disekelilingnya.

Kebudayaan merupakan cara berlaku yang dipelajari: kebudayaan tidak tergantung dari transmisi biologis atau pewarisan melalui unsur genetik semata akan tetapi ia lebih dari sekedar warisan masyarakat masa lalu. Perlu ditegaskan di sini agar dapat dibedakan prilaku budaya dari manusia dan primat yang lain dari tingkah laku yang hampir selalu digerakkan oleh naluri. Perbedaan manusia dengan makhluk primata (kera) sangat jauh berbeda. Manusia berperilaku berdasarkan tatanan masyarakat yang memuat nilai-nilai, norma-norma sosial sedangkan makhluk primata bertindak sesuai dengan naluri setelah menerima rangsangan dari luar. Hal ini sudah dibuktikan oleh beberapa penelitian tentang kebudayaan masyarakat manusia.

Semua manusia dilahirkan dengan tingkah laku yang digerakkan oleh insting dan naluri yang walaupun tidak termasuk bagian dari kebudayaan, namun mempengaruhi kebudayaan. Misalnya, kebutuhan akan makanan adalah kebutuhan dasar yang tidak termasuk kebudayaan. Tetapi bagaimana kebutuhan-kebutuhan itu dipenuhi - apa yang kita makan - dan bagaimana cara kita makan adalah bagian dari kebudayaan kita. Jadi, semua orang makan tetapi kebudayaan yang berbeda melakukan kegiatan dasar itu dengan cara-cara yang sangat berbeda pula. Dalam persfekrif antropologi – sosial, tindakan manusia selalu ditentukan oleh pola-pola perilaku yang

senantiasa menjadi dasar bertindak. Pola-pola perilaku dimaksud menjadi bahan pelajaran bagi semua anggota masyarakat dan senantiasa dilestarikan melalui pelembagaan kembali pola-pola tindakan yang telah menjadi patokan dalam berprilaku. Pelaksanaan pola-pola berprilaku bermasyarakat dalam teori antropologi memasuki banyak cara,antara lain melalui proses internalisasi, sosilisasi, enkulturasi, evolusi sosial, difusi dan terakhir proses evolusi kebudayaan[48]. Semua proses tersebut merupakan sarana pembelajaran kebudayaan karena manusia sebagai objek sekaligus sebagai subjek pembelajaran. Dalam kaitan dengan sistem kekerabatan, misalnya, proses internalisasi, sistem kekerabatan menjadi bagian internal setiap individu karena, secara teoretis, proses internalisasi dimulai sejak manusia dilahirkan, sampai ia hampir meninggal, dimana ia belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi yang diperlukan sepanjang hidup, terutama yang terkait dengan nilai-nilai, norma atau kepercayaan-kepercayaan yang dianut dalam system kekerabatan yang dianut. Itulah sebabnya sehingga suatu kebudayaan selalu melekat pada setiap orang karena proses pembelajarannya melalui beberapa tahap sebagaimana yang diasumsikan dalam teori tentang proses pembelajaran kebudayaan.

[48] Koentjaraningrat, op.cit, hal. 228-240.

B. Mitologi, Simbol dan Sistem Kekerabatan

Antropologi-sosial sebagai ilmu terdiri dari banyak konsep yang dapat berdiri sendiri sebagaimana ilmu-ilmu lainnya. Sebagai ilmu tentang kebudayaan manusia, antropologi harus mampu menjangkau semua ide-ide, gagasan-gagasan dan kepercayaan-kepercayan masyarakat manusia dengan segala dimensinya. Salah satu dimensi kebudayaan manusia adalah adanya unsur mitologi sebagai unsur pembentuk dan perekat suatu kebudayaan. Bahkan, mitologi merupakan salah satu komponen penentu terbentuknya sistem kekerabatan dalam masyarakat manusia.

Dalam masyarakat berbudaya, konsepsi mitologi memiliki ragam makna bagi suatu komunitas tertentu. Artinya, setiap kelompok masyarakat manusia memiliki kepercayaan-kepercayaan tertentu yang dalam bahasa antropologi disebut sebagai mitologi. Selain itu, masyarakat manusia juga memiliki unsur lain selain mitologi yaitu simbol. Simbol merupakan salah satu dari unsur kebudayaan manusia yang terealisasi melalui interaksi simbolik antara sesama manusia dalam momen-momen tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya, unsur lain yang banyak terkait dengan disertasi ini adalah sistem-sistem kekerabatan yang dikenal oleh masyarakat manusia.

1.Mitologi

Teori tentang mitologi dalam antropologi merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan manusia terhadap sesuatu di luar batas kemampuannya. Kepercayaan tersebut juga merupakan produk

kebudayaan manusia yang mempengaruhi tingkah lakunya dalam berinteraksi dalam masyarakat. Mitos merupakan suatu cerita dalam kerangka suatu sistem religi yang ada di masa lalu, kini yang berlaku sebagai kebenaran. Menurut J. Van Baal (1987) melalui mitologi diperoleh suatu kerangka acuan yang memungkinkan manusia memberi tempat kepada bermacam-macam kesan dan pengalaman yang diperoleh manusia selama hidupnya. Bahkan menurut Syukur Dister bahwa melalui mitos manusia dapat berorientasi dalam kehidupan ini, ia tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi; asal-usul dan tujuan hidupnya. Mitos pula menyediakan pegangan hidup bagi manusia[49]. Dalam kaitannya dengan sistem kekerabatan masyarakat manusia, mitos memiliki korelasi yang cukup mendukung terbentuknya suatu sistem kekerabatan. Dapat dikatakan bahwa hampir semua sistem kekerabatan masyarakat manusia di seluruh dunia dimulai dari sistem kepercayaan atau berkaitan dengan mitologi (mitos)[50]. Asumsi ini dirangkum dari beberapa kajian teoretis yang dimulai dari teori asal mula sistem kerabatan masyarakat manusia menurut teori G.A. Wilken yang

---

[49] Pendapat ini dikutip dari buku Hans J. Daeng, op.cit, Hal. 81. Selain itu, pendapat tersebut juga dikemukakan oleh van Peursen bahwa mitos adalah sebuah cerita pemberi pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang.

[50] Asumsi ini dapat dibandingkan dengan terbentukanya sistem kekerabatan beberapa masyarakat tertentu, seperti, terbentuknya sistem kekerabatan Masyarakat Bugis pada umumnya yang dimulai dari mitos *to manurung* yang tercatat dalam kitab La Galigo dalam buku karya Cristian Perlas berjudul " ***Manusia Bugis***" halaman 192-193. Hal ini juga diperkuat oleh tulisan Suriadi Mappangara, dalam buku "***Kerajaan Bone Dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abab XIX***" yang intinya bahwa terbentuknya stratifikasi sosial masyarakat Bugis dikenal adanya pelapisan masyarakat berdasarkan tokoh mitologis to-manurung, Hal,35.

memitoskan fase pertama kekerabatan manusia yang disamakan dengan kumpulan binatang yang hidup berkelompok yang kemudian disebutkan oleh Koenjtaraningraat sebagai teori tentang evolusi keluarga. Bahkan, teori Sigmud Freud menggunakan analisis mitos sebagai dasar untuk membangun teori-teori psikologisnya dengan membandingkan antara hubungan ayah dengan anak dengan mencontoh pada hubungan dalam keluarga hewan[51]. Beberapa penelitian kebudayaan masyarakat manusia membuktikan bahwa mitos memiliki korelasi dengan produk kebudayaan manusia. Oleh sebab itu, mitos merupakan unsur yang fundamental bagi terbentuknya beberapa sistem kekerabatan masyarakat manusia.

2. Simbol

Aspek lain yang menjadi unsur perekat kebudayaan manusia adalah simbol-simbol[52] kebudayaan. Simbol-simbol kebudayaan masyarakat manusia beraneka ragam. Semua simbol masyarakat manusia pada prinsipnya memiliki makna terdalam dari semua realitas kehidupannya. Secara etimologi, simbol atau simbolisasi terambil dari kata Yunani *Sumballo* (*Sumballein*) yang mempunyai banyak arti, yaitu berwawancara, merenungkan, membandingkan, bertemu, melemparkan menjadi satu,

[51] Op.cit, Hal.

[52] Simbol menurut Achnad Fedyani Saifuddin dalam buku berjudul" Antropologi Kontemporer; Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma" adala objek, kejadian, bunyi bicara atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia, Hal. 289.

menyatukan[53]. Dari segi substansinya, simbol atau simbolisasi kebudayaan memiliki makna tersendiri, sebagaimana pendapat Mircea Elide bahwa " simbol mengungkapkan aspek-aspek terdalam dari kenyataan yang tidak terjangkau oleh alat pengenalan lain. Bahkan, dari persfektif antropologi, simbol merupakan modalitas ada yang paling rahasia; penelaannya membuka jalan untuk mengenal manusia sebelum terjalin dalam peristiwa sejarah. Rupa-rupa simbol dapat berubah, akan tetapi fungsinya sama yaitu mengungkapkan suatu situasi batas manusia dan bukan hanya sebagai suatu historis saja. Menurut Elide bahwa simbol-simbol dan gambar-gambar merupakan "jalan masuk " ke dunia adisejarah. Selain itu, simbol juga menjadikan kenyataan langsung terbuka, namun pemikiran itu tidak merusak atau mengosongkan nilai kenyataan itu[54]. Meskipun demikian, simbol merupakan salah satu instrumen kebudayaan yang memiliki banyak fungsi dalam masyaraat. Diantara fungsi simbol adalah menjadi pedoman penunjuk arah, kompas, bagi bertingkah laku secara mantap dan pasti. Selain itu, simbol dalam persfektif antropologi sebagai instrumen penghubung anggota-angggota masyarakat antara masa lalu, kini dan masa yang akan datang.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut tampak bahwa simbol memiliki makna yang sangat relevan untuk dijadikan sebagai sarana untuk pengungkapan makna-makna terdalam dari kelompoknya. Dalam kaitan

---

[53] Op.cit, Hal,82.

[54] Konsep simbolisasi dalam antropologi dapat dilihat dari berbagai tulisan tentang antropologi, seperti, tulisan Konjtaraningraat tentang Suku Asmat, dsb.

dengan sistem kekerabatan, khususnya dalam prosesi perkawinan, dalam masyarakat tertentu penggunaan simbol sebagai instrumen kebudayaan terkait dengan penentuan status sosial seseorang dalam masyarakat. Dalam masyarakat Bugis Bone, misalnya, perluasan dan pembentukan sistem kekerabatan didasarkan pada hirarkhi tradisional yang tercantum dalam kitab La Galigo. Dalam kitab tersebut, kelas bangsawan menganggap bahwa nenek moyang mereka berasal dari keturunan dewata yang mereka simbolkan sebagai ” berdarah putih” dan selain itu tergolong ” berdarah merah” sebagai rakyat biasa (rakyat jelata, ata, budak,). Penggolongan dua kategori masyarakat tersebut mempengaruhi pembentukan status dalam sistem kekerabatan masyarakat Bugis pada umumnya[55]. Oleh karena itu, asumsi teoretik tentang peranan simbol dalam suatu masyarakat merupakan unsur kebudayaan yang sulit dihilangkan.

3. Prinsip-Prinsip Sistem Kekerabatan

Dalam banyak literatur tentang karya-karya antropologi, salah satu objek kajiannya tentang masyarakat manusia adalah sistem kekerabatan sebagai salah satu produk kebudayaan. Sistem kekerabatan sebagai salah satu produk kebudayaan manusia tidak dapat dihindari. Bahkan, dari berbagai tulisan tentang antropologi, sistem kekerabatan menjadi salah satu

[55] Ulasan lebih komprehensif tentang peranan simbol dalam pembentukan struktur sosial dan stratifikasi sosial terdapat dalam banyak tulisan tentang orang bugis, antara lain, Karya Mattulada tentang antropologi politik masyarakat Bugis berjudul “ Latoa” (1975), dan “ Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (1998), Karya Christian Pelras dalam buku berjudul “ Manusia Bugis”, dsb.

aspek yang banyak diberbincangkan. Secara teoretis, sistem kekerabatan masyarakat manusia merupakan produk budaya yang fundamental. Kajian tentang sistem kekerabatan dalam antropologi merupakan kajian lintas ilmu pengetahuan karena dalam sistem kekerabatan terdapat banyak aspek yang dapat dianalisis, seperti, kajian terhadap sistem-sistem sosial, struktur sosial dan stratifikasi sosial. Itulah sebabnya sehingga antropologi dijadikan sebagai displin ilmu yang multi dimensi karena mengkaji lebih komprehensip tentang manusia[56]. Dalam kaitan dengan sistem–sistem kekerabatan, antropologi mempelajari beragam sistem kerabatan masyarakat manusia dengan berbagai persamaan dan perbedaannya.

Karya pertama yang fundamental tentang sistem kekerabatan masyarakat manusia bersumber dari bebarapa ahli antropologi, seperti, J.Lubbock, J.J. Bachofen, J.F. McLennan, G.A. Wilken yang secara teoretis mengemukakan tentang asal-mula dan perkembangan sistem kekerabatan masyarakat manusia[57]. Inti dari semua tulisan tentang sistem-sistem kerabatan tersebut jika dilihat dari persfektif antropologi-sosial memiliki fungsi dan tujuan yang sama yaitu sebagai acuan untuk bertindak baik dalam kelompok maupun di luar kelompok. Beberapa prinsip pokok yang dapat

[56] Hal ini dikemukakan oleh Achmad Feyadi Saifuddin mengenai kajian antropologi manusia–masyarakat dan kebudayaannya. Antropologi juga dipandang sebagai “sosiologi komparatif’ karena mengkaji aneka ragam masyarakat manusia, mengembangkan teori-teori umum tentang masyarakat bekerja, dst. Ulasan lebih dalam dalam buku berjudul “ Antropolgi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, Hal. 141-142.

[57] Lebih jauh dibahas dalam karya Koenjtaraningrat tentang Pengantar Antropologi, Pokok-Pokok Etnografi II, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hal. 85-142.

ditarik dari berbagai sistem-sistem kekerabatan yang dianut oleh beberapa kelompok masyarakat yaitu, ***pertama***, sistem kekerabatan masyarakat manusia bersifat dinamis dari satu pola ke pola selanjutnya sesuai dengan perkembangan kebudayaan manusia dari pola ***promiscuiteit*** sampai pada pola patriarchat)[58]. ***Kedua***, dalam sistem kekerabatan berlaku stratifikasi sosial dalam pembentukan dan pengembangan keluarga[59]. **Ketiga**, adanya pengaruh adat-istiadat terhadap pembentukan dan pengembangan sistem kekerabatan[60]. ***Keempat***, sistem kekerabatan dipengaruhi oleh unsur mitos baik dalam pembentukan dan pengembangan kekerabatan[61]. **Kelima**, dalam sistem kekerabatan dikenal konsep keluarga inti dan bukan keluarga inti [62]. Konsep keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak yang disebut juga rumah tangga dan bukan keluarga inti yaitu keluarga yang di luar keluarga inti, seperti, ponakan, sepupu, dst[63]. Beberapa prinsip dari sistem kekerabatan

---

[58] Prinsip ini dapat diketahui dari tulisan G.A. Wilken tentang asal mula sistem kekerabatan masyakat manusia dalam buku, Koentjaraningraat , Metode2, Antropologi dalam Penyeledikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia: Sebuah Ikhtisar, Penerbit Universitas, cet. Ketiga, Djakarta, 1961, Hal. 70-72. atau karya Koentjaranigraat dalam buku " Pengantar Antropologi, Pokok-Pokok Etnografi, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hal. 85- 87.

[59] Prinsip ini ditemukan dalam berbagai sistem kekerabatan, misalnya, perkawinan antara suku yang berbeda, atau perkawinan antara kelas atas dengan kelas bawah, dst.

[60] Prinsip ini berlaku pada Suku Bangsa Australia, Melanesia, dan mungkin juga di Indonesia Timur, dst, lihat dalam Karya Kuntjaranigrat, op.cit, Hal. 96- 105.

[61] Dapat dilihat dalam sistem perkawinan atau pengangkatan Raja Bone berdasarkan simbol "anak arung" yang nenek moyang mereka berasal dari *to manurung*, lihat buku Mattulada, Christian Perlas, dsb.

[62] Prinsip ini dapat ditemukan dalam tulisan Mattulada yang menguraikan sistem kekerabatan Masyarakat Bugis yang disebut *siajing mareppe, siajing riale* (kerabat inti), seperti, dan *sompung lolo* (bukan kerabat inti).

[63] Prinsip ini dapat dilihat, misalnya dalam sistem kekerabatan masyarakat Bugis padan umumnya mengenal keluarga inti (perkawinan yang disebut sebagai ***bati***' dan bukan keluarga inti disebut ***wija*** ditulis dalam tulisan Anwar Ibrahim Tentang, Derajat Darah, Sperma dan Kekuasaan:Suatu Esei Mengenai Budaya Politik Orang Bugis- Makassar,

tersebut merupakan prinsip universal dari masyarakat manusia yang umumnya memmpunyai tujuan sama yaitu sebagai instrumen untuk mempertahankan sistem kekerabatan yang secara tradisional dipertahankan sepanjang masa.

E. Adat Istiadat, Nilai, Norma Kemasyarakatan

1. Adat-Istiadat

Nilai-nilai budaya sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi terhadap hidup, bersifat sangat umum. Sebaliknya, norma yang berupa aturan-aturan untuk bersifat khusus, sedangkan perumusannya biasa sangat terperinci, jelas, tegas, dan tak meragukan (Koentjaraningrat, 1981: 195). Dari persfektif antrpologi-sosial, adat-istiadat merupakan pola yang merupakan endapan dari nilai-nilai kultural yang menjadi acuan setiap invidu dalam bertindak masyarakat setempat. Karena sifatnya sebagai pedoman, maka adat-istiadat mengikat setiap kelompok dalam melaksanakan aktivitasnya.

Bagi masayarakat yang terikat dengan adat-istiadat, status sosial seseorang ditentukan oleh apa yang sudah menjadi adat dan dilaksanakan sesuai dengan adat. Karena pentingnya adat-istiadat dalam masyarakat, maka adat istiadat merupakan produk budaya manusia yang dijadikan oleh

---

2007,ha.2. Bahkan, menurut Koentjaraningrat mengutip hasil penelitian G.P Murdock bahwa di seluruh dunia, masyarakat keluarga inti berdasarkan pola poligini lebih banyak daripada keluarga inti monogami.

setiap orang untuk bertindak. Pada masyarakat tertentu, misalnya. masyarakat Bugis pada umumnya, adat istiadat dikenal dengan sebutan *panggadereng* [64]. *Panggadereng* bagi masyarakat Bugis pada umumnya pola kehidupan yang berisi norma kehidupan yang dapat menuntun manusia mencapai kesempumaan hidup. Oleh karena itu, adat istiadat dalam masyarakat tertentu merupakan standar kelakukan yang dalam bahasa antropologi merupakan salah satu institusi sosial (*social institutions*) atau dalam sosiologi disebut sebagai ”*social capital*”.

Dalam teori antropologi institusi sosial atau modal sosial difungsikan sebagai dasar dalam membangun kehidupan dan keberlangsungan suatu masyarakat. Peran ini sangat penting mengingat masyarakat memiliki banyak karakter dan kepentingan sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik antara warga, terutama dalam kaitannya dengan persoalan-persolan yang timbul dalam perkawinan yang berbeda stratifikasi sosialnya atau persoalan interen keluarga dalam satu kekerabatan.

2. Norma Sosial

Norma-norma yang khusus itu dapat digolongkan menurut masyarakat yang ada. Setiap masyarakat mempunyai sejumlah pranata, seperti pranata-

---

[64] *Panggadereng* sebagai produk budaya Bugis berupa konsep, seperti, *singkerung* (sikap hidup) yang terjelma dalam bentuk *siri, ade, bicara, rapang dan wiri*. Dalam bentuk tingkah laku, seperti, tersimpul dalam *barangkau (tingkah laku),*berujud sebagai aspek fisik yang disebut ”*abbarampareng*” yang semuanya menjadi wujud kebudayaan masyarakat Bugis untuk mencapai kesempuraan hidup. Penjelasan lengkap Istilah ini dapat dilihat dalam buku antropologi tentang Masyarakat Bugis, seperti, Disertasi Mattulada tentang ”Latoa”, Universitas Indonesia, 1975, Hal. 306-355.

pranata ilmiah, pranata pendidikan, pranata peradilan, pranata ekonomi dan sebagainya. Sejajar dengan adanya aneka wama juga norma-norma ilmiah, norma-norma pendidikan, norma-norma politik, norma-norma peradilan, norma-norma ekonomi dan lain sebagainya.

Peran norma sosial dalam suatu pranata dan sub-sub pranatanya sudah tentu erat berkaitan satu dengan lain, dan karena itu juga merupakan suatu sistem yang terintegrasi. Kecuali itu norma-norma dalam suatu pranata sudah tentu juga berkaitan dengan norma-norma dalam pranata-pranata lain yang berdekatan, menjadi sistem-sistem yang lebih luas. Sistem-sistem yang lebih luas itu disebut unsur-unsur kebudayaan universal.

Sistem-sistem norma biasanya hanya untuk sebagian difahami oleh para individu warga masyarakat. Beberapa individu saja yang biasanya mengetahui banyak mengenai seluk-beluk sistem norma dalam rangka suatu pranata atau beberapa pranata yang berkaitan satu dengan lain. Individu-individu ahli mengenai norma-norma semacam itu dalam masyarakatnya disebut "ahli adat". Warga-warga masyarakat lainnya yang tidak mengetahui tentang adat, yang hanya mengetahui sedikit, atau yang hanya mengetahui sebagian, biasanya hanya dapat minta nasehat kepada ahli adat.

Dalam masyarakat yang sederhana, di mana jumlah pranata dalam kehidupan masyarakat masih sedikit, dan di mana jumlah norma dalam suatu pranata juga kecil, maka satu orang ahli adat dapat mencakup pengetahuan mengenai semua norma dalam banyak pranata, bahkan seringkali semua

pranata yang ada dalam masyarakatnya. Sebaliknya, dalam masyarakat yang kompleks di mana jumlah pranatanya sangat banyak dan dimana jumlah norma tiap pranata juga sangat besar, seorang ahli seperti "ahli adat" dalam masyarakat yang sederhana, tak dapat lagi menguasai seluruh pengetahuan mengenai semua sistem norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Demikian ada ahll-ahli khusus mengenai norma-norma kekerabatan, ahli-ahli khusus mengenai norma-norma perdagangan, ahli-ahli khusus mengenai norma-norma keagamaan, dan sebagainya. Bahkan dalam masyarakat yang kompleks seperti itu, norma-norma dalam satu pranata sudah sedemikian banyaknya, sehingga sistem itupun tak dapat lagi dikuasai oleh satu orang, sehingga terpaksa dibagi antara sejumlah ahli.

Norma yang mengatur dan menata tindakan mereka itu tidak sama beratnya. Ada norma-norma yang sangat berat sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma seperti itu, akan ada akibatnya yang panjang. Para pelanggar akan dituntut, diadili, dan dihukum. Sebaliknya, ada juga norma-norma sosial yang dianggap kurang berat sehingga apabila dilanggar tidak akan ada akibat yang panjang, melainkan hanya tertawaan, ejekan, atau penggunjingan saja oleh warga masyarakat lainnya. Oleh W.G Summer norma-norma golongan pertama disebut *mores*[65], dapat disebut dalam bahasa Indonesia adat istiadat dalam arti khusus, sedangkan *folkways* dapat disebut tata cara perbuatan yang sudah terpola dalam masyarakat.

[65] Koentjaraningrat, op.cit, hal. 197.

Dalam kaitan dengan sistem kerabatan, dianut pula beberapa asas atau kaidah dalam pembentukan dan pengembangan kekerabatan. Bahkan, asas atau norma yang berlaku lebih rumut dan rinci serta bercampur dengan mitos tertentu. Misalnya, dalam sistem kekerabtan Masyarakat Bugis pada umumnya bersifat exogam dan menganut asas/norma bahwa prinsip keturunan matri-lineal tetapi perkawinan bersifat patri-loka"[66]. Norma ini, jika dikaitkan dengan teori G.A. Wilken menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis *patriarchat*. Pemberlakuan asas/norma ini berlaku mutlak bagi sistem kerabatan masyarakat Bugis pada umumnya di Sulawesi Selatan. Karena itu, semua struktur kekerabatan baik yang tergolong *bati* dan wija menganut asas/kaidah tersebut karena telah menjadi adat-istiadat setempat.

D.Perkawinan Sebagai Simbol Kebudayaan

1. Perkawinan Dalam Perspektif Masyarakat Bugis

Perkawinan adalah salah satu kejadian sosial yang penting dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Tingkat kemeriahan suatu perkawinan

[66] Asas atau norma ini bersumber dari anggapan bahwa yang satu lebih tinggi (asal dari langit) dari pada yang lain (asal dunia bawah). Asas/kaidah ini dipengaruhi oleh mitos *to Manurung* yang dapat dilacak dalam mitologi Galigo. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dalam sistem kekerabatan Bugis kecenderungan mencari jodoh dalam lingkungan kerabat yang lebih dekat (*asseajingeng*) baik dari kerabat ayah dan ibu, dalam arti *bati* dan *wija*.Dikutip dari disertasi Mattulada, op.cit, hal. 41.

ditentukan status sosial masyarakat bersangkutan[67]. Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti *siala'* saling mengambil satu sama lain Jadi, perkawinan adalah ikatan timbal-balik. walaupun mereka berasal dari status sosial berbeda, setelah menjadi suami-istri mereka merupakan mitra. Hanya saja, perkawinan bukan sekadar penyatuan dua mempelai semata, tetapi suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud kian mempererat dalam teks Bahasa Bugis disebut *ma'pasideppe' mabela-e* atau mendekatkan yang sudah jauh[68].

Perkawinan umumnya berlangsung antar keluarga dekat atau antar kelompok patronasi yang sama, sehingga mereka sudah saling memahami sebelumnya. Oleh karena itu mereka yang berasal dari daerah lain, cenderung menjalin hubungan yang lebih dekat lagi dengan orang yang telah mereka kenal baik melalui jalur perkawinan atau dengan kata lain, perkawinan adalah cara terbaik membuat orang lain menjadi "bukan orang lain" *(tennia tau laeng).*

Idealnya, perkawinan dilangsungkan dengan keluarga sendiri. Perkawinan antar sepupu, sepupu paralel (yaitu keduanya melalui sisi ibu atau melalui sisi bapak) atau pun sepupu silang yaitu satu dari sisi ibu dan

---

[67] Ulasan Chabot, *Bontoramba, Sebuah Desa Gowa Sulawesi Selatan*" dalam Koentjaraningrat *Masyarakat Desa di Indonesia.* Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ibid, hal. 202)

[68] Christian Pelras, op.cit. hal. 178

sarunya lagi dari bapak, dianggap sebagai perjodohan terbaik. Ada silang pendapat di kalangan masyarakat Bugis tentang lapisan sepupu keberapa yang boleh dan yang tidak boleh dikawini. Banyak yang menganggap bahwa perkawinan dengan sepupu satu kali (perkawinan semacam ini disebut *siala marola)* "terlalu panas", sehingga hubungan seperti itu jarang terjadi, kecuali di kalangan bangsawan tertinggi. "Darah putih" yang mengalir dalam tubuh mereka dan harus dipelihara membuat mereka melakukan hal itu, sebagaimana halnya tokoh-tokoh dalam cerita *La Galigo.* Sementara masyarakat biasa lebih menyukai perkawinan dengan sepupu kedua *(siala memeng)*, lalu sepupu ketiga dan keempat.

Hal penting lainnya adalah, pasangan yang hendak menikah tidak boleh berasal dari generasi atau angkatan yang berbeda. Pasangan yang hendak menikah sebaiknya berasal dari generasi atau "angkatan" yang sama. Perkawinan antara paman dan kemenakan perempuan, atau bibi dan kemenakan laki-laki dilarang, dan hubungan badan di antara mereka akan dianggap sebagai *salimaa (hubungan* sumbang, *incest*). Sementara itu, perkawinan dengan anak dari sepupu keberapa sebaliknya dihindari. Naskah silsilah yang ada, menunjukkan bahwa aturan ini ditegakkan dengan sangat ketat, dan jarang sekali terjadi pelanggaran. Mengingat seringnya para bangsawan, begitu pula anak-anak mereka, kawin dengan perempuan yang berusia jauh lebih muda dari mereka, menyebabkan banyak putra bangsawan yang sebaya usianya dengan kemenakan mereka. Namun, tidak

ada paman/bibi yang kawin dengan kemenakan mereka walaupun usia mereka sebaya.

Bagi kaum bangsawan, faktor lain yang harus diperhatikan-yang paling ,penting, adalah kesesuaian derajat antara pihak laki-laki dan perempuan. lerbeda dengan bangsawan laki-laki yang diperbolehkan kawin dengan pasangan status lebih rendah, bangsawan perempuan sama sekali tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang lebih rendah derajatnya. Semakin tinggi status kebangsawanan seseorang, semakin ketat pula aturan yang diberlakukan. Hal itu masih tetap berlaku hingga kini. Namun, di kalangan bangsawan rendah, kompromi kian hari kian cenderung terjadi. Istri utama pria bangsawan tinggi (yang tidak mesti istri pertama) biasanya memiliki derajat kebangsawanan yang sama dengan suaminya. Sementara istri-istri lainnya bisa berasal dari kalangan lebih rendah, atau bahkan orang biasa.

Dalam proses perkawinan, pihak laki-laki harus memberikan mas kawin kepada perempuan. Mas kawin terdiri atas dua bagian. Pertama, *sompa* (secara harfiah berarti "persembahan" dan sebetulnya berbeda dengan mahar dalam Islam) yang sekarang disimbolkan dengan sejumlah uang *rella'* (yakni *rial,* mata uang Portugis yang sebelumnya berlaku, antara lain, di Malaka). *Rella'* ditetapkan sesuai status perempuan dan akan menjadi hak miliknya. Kedua, *dui menre* (secara harfiah berarti 'uang naik') adalah "uang antaran" pihak pria kepada keluarga pihak perempuan untuk digunakan melaksanakan pesta perkawinan Besarnya *dui menre* ditentukan

oleh keluarga perempuan. Selain itu ditambahkan pula *lise kawing* (hadiah perkawinan), dalam Islam disebut *mahar* atau hadiah kepada mempelai perempuan: biasanya dalam bentuk uang.

Berdasarkan beberapa uraian tentang perkawinan menurut persfektif Bugis tersebut banyak perbuatan atau cara-cara yang umumnya merupakan simbol-simbol yang terangkai dalam prosesi perkawinan. Diketahui bahwa dalam antropologi-sosial cara-cara yang dilakukan merupakan wujud dari kebudayaan manusia yang didalamya mengandung makna yang dalam dalam setiap kebudayaan. Cara-cara tersebut tidak dilakukan hanya sekedar simbolik dari ritual semata, akan tetapi meskipun demikian juga merupakan upaya untuk mewujudkan suatu perkawinan yang sesuai dengan adat-istiadat. Pelaksanaan dari setiap tahap tersebut bertujuan agar perkawinan senantiasa mencapai kesempurnaan hidup sebagaimana yang telah ditetapkan dalam adat-istiadat.

Bagi penganut aliran simbolik, seperti, Edwar Tylor (perintis antropologi abad ke-19), Leslie White dan Emest Cassier menganggap bahwa semua tata cara perkawinan dalam suatu masyarakat merupakan penggunaan simbol-simbol sebagai media visualisasi makna terdalam kepribadiannya. Bahkan, menurut Emest Cassier bahwa ” tanpa suatu konteks simbol, pikiran rasional tidak akan mungkin terjadi. Manusia memilik kemampuan untuk mengisolasi hubungan-hubungan dan mengembangkannya dalam makna abstrak.

2. Prinsip-Prinsip Keturunan yang Mengikat Kelompok Sosial

Secara teoretis, seseorang dikatakan berkerabat apabila orang tersebut mempunyai hubungan ”darah” dengan seorang individu tadi baik melalui ibunya maupun melalui ayahnya. Terbentuk hubungan darah antara satu orang dengan orang lain jumlahnya banyak, namun seseorang dapat mengenali silsilah kekerabatannya berdasarkan ”kekerabatan biologis” dan dapat membedakannya dengan ”kekerabatan sosiologis”. Selain itu, hubungan kekerabatan biologis dapat diketahui dari ciri-ciri tertentu, seperti, dapat menjadi ahli waris, berhak atas suatu gelar, berhak atas kedudukan tertentu dalam masyarakat, dsb.[69]. Oleh sebab itu, dalam menentukan posisi seseorang dalam suatu sistem kekerabatan berlaku beberapa prinsip keturunan yang dapat menjadi acuan menentukan posisi seseorang agar dapat digolongkan sebagai kerabat. Prinsip dimaksud adalah, **pertama**, prinsip patrilineal yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan pria, sehingga semua kaum kerabat ayah termasuk dalam batas kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibu berada di luar batas itu. **Kedua**, prinsip matrilineal yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan wanita, sehingga semua kaum kerabat ibu termasuk dalam batas kekerabatannya, sedang semua kaum kerabat ayah berada di luar batas itu. **Ketiga**, prinsip bilineal yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan pria dalam kaitannnya

[69] Koentjaranigrat, op.cit, hal. 122-123.

dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, dan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan wanita bagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain pula, sehingga untuk keperluan-keperluan tertentu seseorang individu menggunakan kedudukannya sebagai kerabat ayahnya, dan di kesempatan lain sebagai kerabat ibunya. **Keempat**, prinsip bilateral yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan pria dan wanita. Selain itu, terdapat empat tambahan prinsip kekerabatan yang berlaku bagi seseorang yaitu :

1. prinsip ambilineal, yaitu yang memperhitungkan hubungan kekerabatan dengan sebagian warga masyarakat melalui garis keturunan pria, dan sebagian warga masyarakat lain melalui garis keturunan wanita.
2. prinsip konsentris yang memperhitungkan hubungan kekerabatan dengan jumlah angkatan yang terbatas.
3. Prinsip primogenitur yang memperhitungkan hubungan kekerabatan dengan sebagian warga masyarakat melalui garis keturunan pria dan wanita, akan tetapi berlaku bagi yang tertua saja.
4. Prinsip ultimogenitur yang memperhitungkan hubungan kekerabatan dengan sebagian warga masyarakat melalui garis keturunan pria dan wanita, akan tetapi berlaku bagi yang termuda saja[70].

[70] Dikutip dari buku Koenjtaraningrat, op.cit, Hal. 123-124.

Beberapa prinsip kekerabatan tersebut merupakan kategori teoretis yang dapat saja ditemukan dari beberapa sistem kekerabatan masyarakat manusia sesuai dengan wujud dan perkembangan kebudayaannya masing-masing.

E. Struktur dan Stratifikasi Sosial

1. Struktur Sosial (teori Radcliffe-Brown)

Pengkaji teori struktur sosial dalam antropologi sebagaimana dikemukakan Radcliffe-Brown berupaya merumuskan definisi tentang struktur sosial. Menurutnya, struktur merupakan kumpulan sejumlah unsur, seperti, atom, molekul, organisme, masyarakat – yang mengacu hubungan antar bagian yang saling melengkapi. Definisi tepat tentang struktur sosial sebagaimana dikemukakan oleh Radcliffe-Brown[71] bahwa ”Pengaturan kontinu atas orang-orang dalam kaitan hubungan yang ditentukan atau dikendalikan oleh institusi, yakni norma atau pola perilaku yang dimapankan secara sosial”. Rumusan tersebut tampak bahwa struktur sosial merupakan suatu kumpulan kaidah/norma yang memiliki kemampuan pengendali sosial baik secara interen dan eksteren. Dalam kaitan dengan sistem kekerabatan, maka struktur sosial memikiki peran (role) dalam pembetukan dan

[71] Beberapa teori struktur sosial sebelumnya, seperti, Evans-Paritchard bahwa ” struktur sosial adalah konfigurasi kelompok-kelompok yang mantap, sesuai pendapat Talcott Parson yang menyebutkan sebagai “ suatu sistem harapan/ekspektasi normatif –normative expectatitons, Lech menyebunya sebagai “ seperangkat norma atau aturan ideal sedangkan Claude Levi-Strauss sebagai “ model”. Dikutip dari buku David Kaplan berjudul “*The Theory of Cultur*e” yang diterjemahkan oleh Landung Simatupang berjudul “Teori Budaya”, Pustaka Pelajar Offset, Cet. Ketiga, Yogyakarta, 2002, Hal. 139.

pengembangan kaidah-kaidah sosial. Kaidah-kaidah sosial ini dalam menjalankan perannya terhadap tindak sosial, interaksi sosial sehingga dalam pembentukan sistem kekerabatan peran struktur sosial sangat menentukan. Hal ini dapat dilihat dalam tulisan Radcliffe-Brown tentang struktur sosial sebagai kaidah ekuivalensi dimana saudara sekandung, akidah solidaritas garis keturunan, dan seterusnya[72].

Penerapan teori ini kedalam sistem kekerabatan, struktur sosial mempengaruhi pembentukan kaidah-kaidah kekerabatan yang mengikat semua anggota keluarga. Meskipun demikin, para peneliti tersebut setelah mengadakan analisis bahwa terkadang struktur sosial menampakkan suatu hal yang bersifat dualistis dan anomali, namun tetap menjadi kaidah pembentukan struktur dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam karya buku berjudul "*Les Structure elementaires de la parente*"[73] tahun 1949 menemukan tiga bentuk stuktur sosial yang berlaku dalam perkawinan yaitu, **pertama**, perkawinan antara saudara sepupu secara menyilang dan bilateral. **Kedua**, perkawinan antara anak laki-laki dari saudara perempuan dengan

[72] Implementasi konsep dikemukakan oleh beberapa pandangan strukturalis-sosial yang menjelaskan struktur kemasyarakatan dengan merumuskan beberapa kaidah tertentu yangmenjadi landasan organisasi. Misalnya, antropolog Inggeris menganalisis masyarakat Inggeris dalam garis keturunan segmentaris yang dihubungkan dengan "kaidah segmentris" sehingga terkesan bahwa seoralh warga masyarakat mempunyai "cetak biru" dalam pikiran mereka tentang masyarakat mereka sendiri, Ibid, Hal. 140. Pengaruh konsep ini juga berlaku dalam masyarakat Brazil Tengah dan Timur yang tergolong suku primitif. Dalam struktur sosialnya, hasil penelitian Colbacchini, Nimuendaju dan Calaude Levi-Strauss, terhadap suku Sherente yang mengenal sistem kekerabatan berdasarkan patrilineal eksogam sedangkan Suku Canella dan Bororo menganut sistem matrilineal eksogam dikutip dalam buku Claude Levi-Strauss berjudul " Antropologi Struktural ", op.cit, Hal. 159.

[73] Ibid, Claude Levi-Strauss, op.cit, hal. 161.

anak perempuan dari saudara laki-laki. **Ketiga**, perkawinan antara anak laki-laki dari saudara laki-laki dengan anak perempuan dari saudara perempuan. Munculnya tiga bentuk struktur sosial tersebut menujukkan bahwa dalam pembentukan dan pengembagan sistem kerabatan tidak statis akan tetapi dinamis sesuai dengan perkembangan kebudayaanya. Konsukeunsi logisnya semua institusi –institusi sosial, struktur sosialnya menyesuaikan diri dengan perubahan substantif dalam struktur sosialnya.

2. Stratifikasi Sosial (Teori Parson, Weber dan Marx)

Penemu teori-teori stratifikasi sosial, seperti, karya Talcott Parson, Weber dan K. Marx dan Petirim A. Sorokin menunjukkan secara signifikan adanya stratifikasi sosial atau pelapisan sosial dalam masyarakat. Bagi Weber stratifikasi sosial terbentuk karena seseorang berdasarkan status kepemilikan atau harta kekayaan sedangkan Parson[74] berdasarkan pada kekayaan dikaitkan dengan pekerjaan. Adapun Petirim A. Sorokin penyebab stratifikasi sosial karena seseorang memiliki sesuatu yang dihargai atau dibanggakan dalam jumlah yang lebih dari pada yang lainnya[75].

Beberapa pendapat tentang penyebab stratifiksi sosial tersebut menunjukkan bahwa hal dimaksud sangat penting dibahas dalam kaitannya dengan sistem kekerabatan oleh karena pengetahuan tentang sistem

---

[74] Uraian tentang stratifikasi social dapat dilihat dalam buku Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat, CV. Rajawali Jakarat, 1983, hal. 254-255.

[75] Dikutip dalam buku Abdulsyani, Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hal. 83.

pelapisan sosial berarti mengetahui dan mencari latar belakang pandangan hidup atau sifat-sifat yang mendasari kebudayaan dari suatu masyarakat[76]. Selain itu, mengetahui pelapisan masyarakat dapat diungkapkan hubungan-hubungan, kejadian-kejadian dalam masyarakat yang menyangkut tingkah laku segenap individu atau kelompok dalam masyarakat. oleh sebab itu, teori tentang stratifikasi sosial sangat relevan untuk dijadikan sebagai teori pendukung untuk menganalisis sistem kekerabatan dalam suatu masyarakat.

Dalam masyarakat tertentu, ada pelapisan sosial yang terbentuk berdasarkan mitos[77] dan alami[78]. Pengaruh pelapisan sosial terhadap pranata-pranata sosial (sistem kekerabatan) pada prinsipnya menurut Koentjaranigrat disebabkan karena jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah. Asumsinya, jika semakin banyak dan kompleks suatu masyarakat maka semakin berpeluang untuk terbentuknya pelapisan sosial dan demikian pula sebaliknya[79]. Selain itu, munculnya pelapisan sosial dapat disebabkan karena kedudukan seseorang dalam masyarakat yang ditentukan

---

[76] Mattulada, *Latoa, Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik orang Bugis*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), hal.24.

[77] Pelapisan sosial berdasarkan mitologi tampak dalam masyarakat Bugis pada umumnya yang menurut buku La Galigo bahwa munculnya tokoh mitologis *to –manurung* dan keturunannya yang oleh masyarakat Bugis percaya mempunyai darah putih. Faktor ini juga mempengaruhi pelapisan sosial, ekonomi dan politik sebagaimana penelitian Th. Chabot, dalam buku *Verwatenschap, Standen Sexe zuid Celebes*, (Jakarta: J.B. Wolters,1950), hal.243-247.

[78] Istilah pelapisan sosial dikalangan ilmuan berbeda-beda, Dalam antropologi sosial dan sosiologi disebut *social* ***stratum***, ***social class***, atau ***estate***. Bagi Karl Max dan pengikutnya menyebutnya sebagai ***class struggle*** yang akan ada sepanjang masa dan terbentuk karena perbedaan penguasaan terhadap faktor-faktor produksi. Bagi Koenjaranigrat disebut sebagai lapisan sosial tak -resmi yang menyamakannya dengan istilah bahasa Inggeris *social classes*.

[79] Asumsi ini dibangun dari logika berfikir Koenjaraningrat, op.cit, hal.158.

berdasarkan besar kecilnya kekuasaan, kekayaan, kepandaian, keterampilan, pengetahuan atau kombinasi dari hal-hal tersebut sehingga menentukan tinggi rendahnya kedudukan seseorang. Meskipun demikian, Koentjaranigrat mengemukakan beberapa sebab terjadinya pelapisan sosial yaitu (a) kualitas serta keahlian (b) senioritas (c) keaslian (d) hubungan kekerabatan dengan kepala masyarakat (e) pengaruh dan kekuasaan (f) pangkat dan (g) kekayaan[80]. Kekerabatan sebagai salah satu faktor penyebab pelapisan sosial dapat dilihat dari sejumlah masyarakat manusia di seluruh dunia, seperti, pelapisan sosial pada masyarakat si Sulawesi Selatan yang pada hakikatnya mengenal dua dua lapisan sosial yaitu *ana'arung* dan *tomaradeka* [81]. Asumsi tersebut membuktikan bahwa teori-teori tentang pelapisan sosial erat kaitannya dengan pembentukan pengembangan sistem kekerabatan masyarakat manusia sepanjang masa.

F. Kerangka Konseptual Penelitian

Gagasan yang diterima dari berbagai disiplin ilmu, utamanya Antropologi terdiri atas dua macam peryataan. Pertama ialah pernyataan empirik tentang fakta, yang didapat melalui pengamatan, observasi. Kedua, pernyataan teoritik yang dipandang bersifat spekulatif serta dapat berubah

[80] Koenjarangrat op.cit, hal.161.

[81]Menurut hasil penelitian Fredericy bahwa golongan *ata*' merupakan lapisan sekunder yang lahir kemudian. Hasil penelitian Christian Perlas tentang pelapisan sosial manusia Bugis berdasarkan *La Galigo* dan mitos berasarkan klas nenek moyang mereka berasal dari keturunan *dewata*. Bahkan, menurutnya, bahwa asal usul stratifikasi sosial masyarakat Bugis terkait dengan kesakralan (mitos dari dewata, pen.), kekuasaan dan kekayaan, *Manusia Bugis*, Nalar, Jakarta, 2006, hal. 196.

dan berbeda seiring dengan pergeseran titik-pandang seseorang. Sejalan dengan itu, jika seorang mengumpulkan semua fakta yang relevan, maka teori dapat dirumuskan dan disusun agar cocok untuk menjelaskan fakta itu. Perbedaan antara fakta dan teori dalam Antropologi, yakni berupa perbedaan antara etnografi (deskripsi budaya) dan etnologi (pembentukan teori mengenai fenomena budaya itu)[82].

Etnologi pembentukan/pendekatan teoretis dan Etnografi adalah pendekatan empiris keduanya bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan (*fieldwork*) yang intensif. Menurut Geertz[83] etnograf bertugas membuat *thick descriptions* (pelukisan mendalam) yang menggambarkan 'kejamakan struktur-struktur konseptual yang kompleks', termasuk asumsi-asumsi yang tak terucap dan *taken-for-granted* (yang dianggap sebagai kewajaran) mengenai kehidupan. Seorang etnografer memfokuskan perhatiannya pada detil detil kehidupan lokal dan menghubungkannya dengan proses-proses sosial yang lebih luas.

Kajian budaya yang menggunakan persfektif-sosial memusatkan diri pada penjelajahan kualitatif tentang nilai dan makna dalam konteks 'keseluruhan cara hidup, yaitu dengan persoalan kebudayaan, dunia-kehidupan (*life-worlds*) dan identitas. Selain itu, dalam kajian ini berorientasi

---

[82] Ibid, Kaplan, hal. 2
[83] Geertz, *The Interpretation of Culture*, 1973, New York: Basic Books.

media, etnografi menjadi kata yang mewakili beberapa metode kualitatif, termasuk pengamatan pelibatan, wawancara mendalam dan kelompok diskusi terarah. Terdapat beberapa kritik pada etnografi dalam persfektif-sosial yang patut diperhatikan: Pertama, data yang dipresentasikan oleh seorang etnografer selalu sudah merupakan sebuah interpretasi yang dilakukan melalui mata seseorang (sumber data), dan dengan demikian selalu bersifat posisional. Tapi ini adalah argumen yang bisa diajukan pada segala bentuk penelitian. Argumen ini hanya menunjuk pada 'etnografi interpretatif'. Kedua, etnografi dianggap hanya sebagai sebuah genre penulisan yang menggunakan alat-alat retorika, yang seringkali disamarkan, untuk mempertahankan klaim-klaim realisnya[84]. Argumen ini mengarah pada pemeriksaan teks-teks etnografis untuk mencari alat-alat retorikanya, serta pada pendekatan yang lebih reflektif dan dialogis terhadap etnografi yang menuntut seorang penulis untuk memaparkan asumsi, pandangan dan posisi-posisi mereka. Juga, konsultasi dengan para 'subjek' etnografi perlu dilakukan agar etnografi tidak menjadi ekspedisi pencarian 'fakta-fakta', dan lebih menjadi percakapan antara mereka yang terlibat dalam proses penelitian.

Kritik terhadap klaim epistemologis etnografi tidak lantas membuatnya tidak bernilai atau harus ditinggalkan. Tidak ada perbedaan epistemologis yang mendasar antara etnografi dan sebuah novel berlapis-lapis yang

[84] Clifford dan Marcus, *Writing Culture*, Berkeley: 1986. Univ. of Califomia Press.

tujuannya bukanlah untuk menghasilkan gambaran yang ‘benar’ tentang dunia, melainkan untuk melahirkan empati dan melebarkan lingkaran solidaritas manusia[85] (Rorty, 1989). Maka, seorang etnograf memiliki justifikasi personal, puitis dan politis ketimbang epistemologis.

Menurut pandangan yang demikian, data etnografis memberi eskpresi puitis pada suara-suara dari budaya-budaya lain atau dari ‘pinggir-pinggir’ budaya kita sendiri. Menulis tentang suara-suara semacam itu tidak lagi dianggap sebagai suatu laporan ‘ilmiah’ tapi ekspresi dan narasi puitis yang memunculkan suara-suara baru untuk bergabung dengan apa yang disebut Rorty sebagai ‘percakapan kosmopolitan umat manusia’[86]. Dengan demikian data etnografis bisa menjadi jalan di mana budaya kita sendiri dibuat menjadi asing, memungkinkan lahirnya deskripsi-deskripsi baru tentang dunia.

Geertz [87](1973) sebagai pelopor Interpretasi Simbolik, memahami kebudayaan sebagai sistem makna fenomena. Bahwa sesuatu itu kosong, dan manusialah yang memberikan padanya makna. Oleh sebab itu, budaya menurutnya adalah teks, sedangkan makna adalah substansi dari teks itu. Budaya dipahami sebagai makna dari simbol yang terkandung dalam berbagai hal yang disepakati sebagai simbol oleh komunitas pendukung kebudayaan secara arbitrer.

---

[85] Rorty, *Contingency, Irony and Solidarity*, 1989, Cambridge: Cambridge Univ. Press.

[86] Ibid.

[87] Op.cit.

Lebih lanjut Geertz (1973) berpendapat bahwa bahasa adalah awal dari simbolisasi yang dipahami manusia. Oleh sebab itu, pemahaman akan bahasa menjadi penting dan syarat utama jika seseorang hendak melakukan penelitian terhadap simbol-simbol tertentu dari suatu komunitas. Dalam konteks ini, Geertz memahami budaya sebagai teks. Atas dasar itu, menurutnya studi antropologi seharusnya bergeser dari upaya eksplanasi menjadi upaya menemukan makna dan memandang penting simbol, dengan meletakkan signifikansi konteks sosial dari simbol itu.

Dua tugas ilmiah para antropolog-sosial yang menggunakan teori interperetasi simbolik (berlaku juga bagi antropolog secara umum), yaitu: (1) mengungkapkan struktur struktur konseptual yang menginformasikan subjek. Dimensi ini biasa disebut *thin description* atau *native point of view* (perspektif emik), (2) merekonstruksi suatu sistem analisis yang ada dalam struktur-struktur berdasarkan konsepsi yang dipahaminya atau *thick description.* Atau dengan kata lain, pemaknaan atas objek studi lebih cenderung didominasi oleh subjektifitas peneliti itu sendiri. Dalam studi antropologi-sosial cara pandang yang demikian disebut perspektif etik. Cara pandang ini juga dikemukakan oleh Kaplan bahwa pembahasan etnografis akan diungkapkan dalam “kategori warga budaya setempat” (*emik*), atau

menurut “kategori Antropolog” (*etik*), atau dalam semacam kombinasi keduanya seperti sangat sering terjadi [88].

Antropologi sosial, salah satu aspeknya adalah analisis simbolik merupakan studi tentang sistem kekerabatan melalui kode dan pesan yang diterima oleh manusia melalui interaksi mereka dengan manusia lain dan dengan dunia ilmiah, khususnya dalam perkawinan. Oleh sebab itu, bagi kaum antropolog sosial yang menggunakan makna simbolik seluruh alam semesta dipenuhi oleh tanda-tanda. Tanda-tanda itulah yang dipahami sebagai teks yang harus dipahami peneliti dalam rangka pengungkapkan kebudayaan manusia. Oleh karena budaya dipahami sebagai teks, maka di dalamnya terdapat sifat teks yang arbitrer atau sewenang-wenang.

Menurut Geertz, budaya ialah sistem makna dari simbol yang terkandung dalam berbagai hal yang disepakati; sebagai simbol oleh komunitas pendukung kebudayaan secara arbitrer. Meskipun bersifat teks sebagai budaya yang arbitrer yang dihasilkan oleh manusia, namun para antopolog simbolik tetap menempatkan manusia sebagai pembawa dan produk dari suatu sistem tanda dan simbol untuk menyampaikan pengetahuan dan pesan-pesan.

Pandangan pandangan teoritis di atas, jika ditarik secara linear ke dalam suatu tenomena budaya, khususnya yang terkait dengan sistem

[88] Ibid, Kaplan, hal. 259

kekerabatan berdasarkan ***wija dan bati*** (Bugis-Bone) akan memunculkan paradigma analisis teoritik yang banyak dipengaruhi titik-pandang atau pendapat yang dilandasi persfektif antropologi-sosial. Dalam konteks ini, fenomena budaya, temasuk perkawinan adat di Bone yang membentuk sistem kekerabatan tertentu memiliki karakternya tersendiri. Sehingga untuk memahaminya dibutuhkan perpaduan disiplin ilmu antropologi yang menganalisis ide-ide, gagasan-gagasan dan kepercayaan kepercayaan dan disiplin ilmu sosiologi menganalisisi realitas (tindakan) dari hal tersebut. Namun demikian hampir tidak ada suatu perspektif yang dapat melakukan pembacaan terhadap suatu fakta budaya secara komprehensif. Kekurangan dalam memahami suatu realitas menjadi cacat bawaan pada setiap perspektif. Untuk itu, tidak ada tempat bagi suatu perspektif dijadikan sebagai sebuah ideologi, kecuali senantiasa mengalami koreksi dan konstruksi untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang sempurna.

Dalam penelitian ini pun tentunya memiliki kelemahan dalam pembacaannya karena penerapan perspektif antropologi-sosial yang cukup luas dan komprehensif hasilnya akan sama. Namun demikian, sejauh ini penulis setelah melakukan telaah teoretis yang cukup banyak melalui penelusuran kepustakaan untuk mendapatkan konsep-konsep yang matang tentang sistem kekerabatan masyarakat manusia,khususnya sistem kekebatan masyarakat Bugis Bone. Bahkan, penelusuran kepustakaan telah

memetakan sejumlah konsep empiris untuk dijadikan variabel penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan mendukung tujuan penelitian. Sebab, dalam antropologi, termasuk antropologi sosial pembacaan terhadap fenomena institusi sosial, seperi, perkawinan, susunan kekerabatan, khususnya yang terkait dengan pembentukan dan pengembangan sistem kekerabatan berdasarkan ***bati'*** dan ***wija*** dalam masyarakat Bugis –Bone, dalam perspektif antropologi sosial, lebih operasional dilakukan dalam rangka penemuan makna dan arti pentingnya bagi kehidupan umat manusia. Karena itu, pembacaan dan penjelasan terhadap realitas yang menjadi fokus dalam penelitian ini akan berupaya menemukan sejumlah makna sebuat institusi sosial yang dapat menjadi sarana penyempurnaan hi dup manusia. Disadari bahwa konsekuensi metodologisnya menekankan pada aspek hermenuitika yang dalam perjalanannya telah mendapatkan kritikan. Beberapa ilmuan boleh jadi mengungkapkan ketidak sepakatannya terhadap penerapan paradigma hermenuitika dalam perspektif antropologi sosial, akan tetapi karena penulisan ini penelitian ingin menggunakannya untuk menemukan suatu realitas sosial yang dapat dimaknai dari perilaku seseorang dalam menentukan status kekerabatannya dalam masyarakat.

Dalam berbagai kehidupan masyarakat tertentu, seperti masyarakat Bugis-Bone ada hal yang sifatnya logis ditemukan di lapangan sehingga penelitian ini terdorong untuk menggunakan pendekatan tersebut, yakni

bahwa sistem kekerabatan masyarakat Bugis-Bone, khususnya dari sudut pandang persfektif antropologi-sosial, sangat relevan dengan interperetasi pemaknaan simbolik ***wija*** dan ***bati*** yang memiliki makna, nilai dan fungsi serta peranan yang signifikan untuk menciptakan keselarasan dalam kehidupan rumah tangga. Keselarasan dan keharmonisan dalam rumah tangga ini kemudian dapat membentuk keselarasan kolektif masyarakat banyak.

Sistem kekerabatan yang dimulai dari suatu perkawinan dalam artian ***wija*** dan ***bati*** merupakan proses penyatuan dua insan dalam satu ikatan batin dan diwujudkan menjadi satu kekerabatan. Didalamnya dipenuhi kompleksitas tindakan melalui upacara-upacara ritual dengan cakupan makna yang beragam. Ragam dimaksud meliputi stratifikasi sosial dan adat istiadat. Dalam konteks ini, segala bentuk proses perkawinan adat merupakan teks, dan baru dapat dipahami makna ketika dilakukan kajian interpretasi dengan memeriksa fenomena sebagai sistem makna dan segala interaksi di dalamnya. Untuk memperoleh gambaran teoritik arah penelitian dalam studi ini, maka pada gambar berikut dikonstruksi kerangka konseptual penelitian yang dapat dilihat pada diagram 1 berikut :

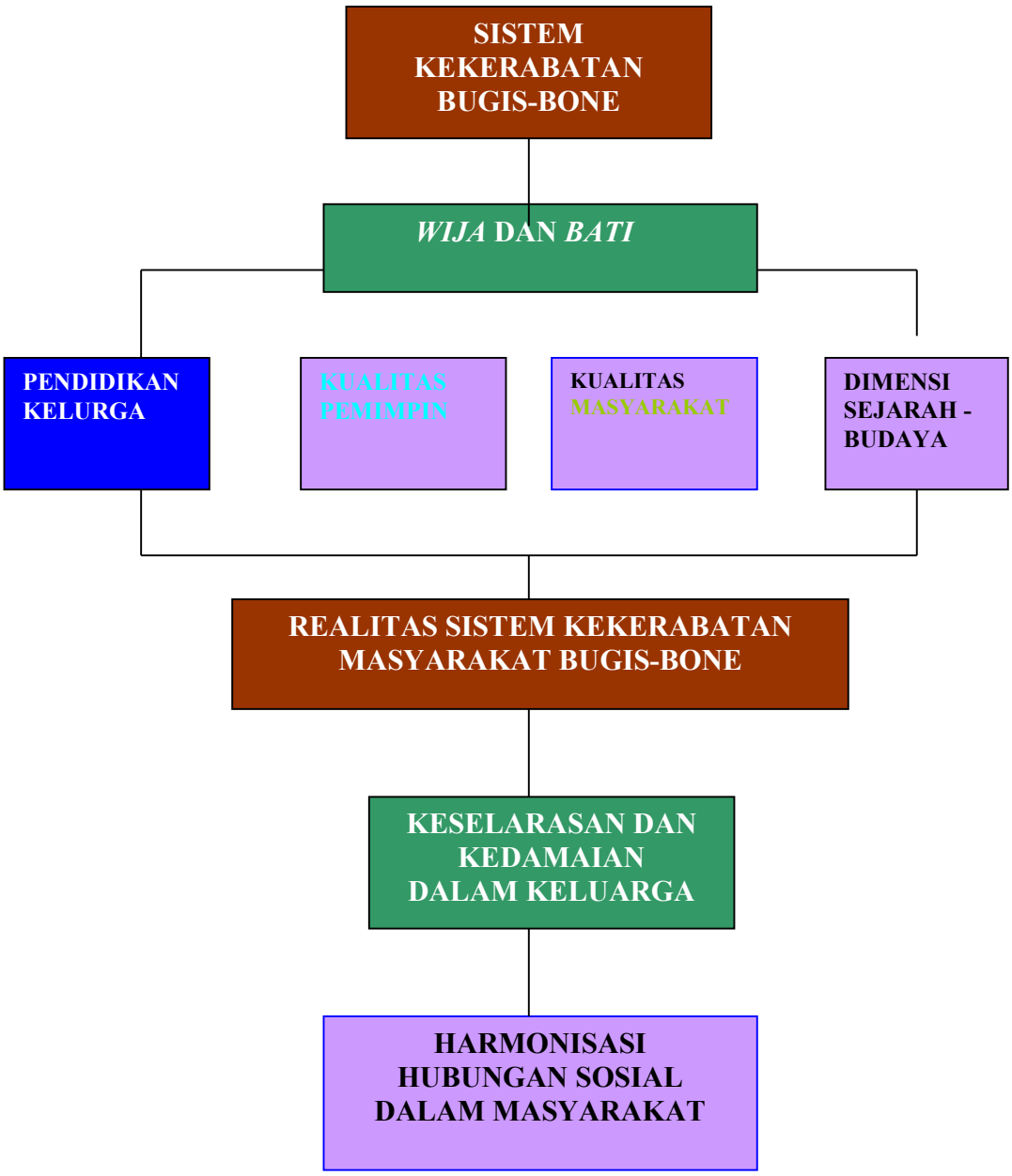

DIAGRAM 1
KERANGKA KONSEPTUAL

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari kategori data yang akan digunakan, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif. Dalam perspektif Bogdan dan Taylor (1993: 5) jenis penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang dapat teramati. Sementara itu, Sugiono memandangnya sebagai penelitian naturalik, yakni suatu metode penelitian yang meneliti kondisi obyek secara alami. Melihat jenis dan sifat penelitian yang alami dan fenomenal sebagai sebuah aktivitas yang sarat dengan simbol dan makna, maka pendekatan penelitian ini diarahkan pada individu dan kelompok secara kolektif (sebagai suatu sistem).

Pendekatan seperti ini dalam pandangan Maleong (1996: 9), yakni pendekatan harus diarahkan pada latar belakang individu secara holistik (utuh), dengan tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hepotesis. Akan tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Dalam versi Abu Hamid bahwa fenomena ditangkap maknanya hanya dalam keseluruhan, kebulatan menyeluruh, suatu bentuk peran kausal timbal balik [89].

[89] Abu Hamid, op.cit, hal.1.

Pendekatan kualitatif fenomenologis yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan atas beberapa alasan rasional sebagai berikut:

1. Fenomena yang dikaji adalah makna dari tindakan atau apa yang ada di balik tindakan seseorang. Dalam penelitian sosial prosedur penelitin ini disebut penelitian fenomenologis, dalam pengertian bahwa yang dikaji adalah sesuatu yang melatar belakangi tindakan seseorang. Sebagaimana diketahui bahwa setiap tindakan selalu dikaitkan dengan apa yang mendasari tindakan tersebut. Bila merujuk pada gagasan dan analisis sosial Weber, maka fenomena seperti ini dinamakan tindakan rasional bertujuan atau ada motif-motif yang mendasari tindakan tersebut (*in order to motive*). Bahkan sebagai tambal sulam mengenai motif tersebut adalah konsep *because motive* (Waters, 1994).
2. Dalam menghadapi lingkungan sosial, individu memiliki strategi bertindak yang tepat untuk dirinya sendiri, sehingga memerlukan pengkajian mendalam terhadap fenomena yang ada. Dalam teori ilmu sosial dinamakan *agensi*, yakni makna dan motif dalam tindakan sosial, sebagaimana diketahui bahwa setiap tindakan (*social action*) selalu dijumpai makna dan motif. Karena itu, untuk memahaminya harus dianalisis dengan pemahaman (*interpretatif understanding*).
3. Mengingat penelitian ini mengangkat topik mengenai sistem kekerabatan yang diperaktekkan oleh individu dan kelompok maka

memungkinkan menggunakan pendekatan data kualitatif di mana orientasi kajiannya adalah fenomena yang bersifat eksternal.Meskipun demikian, dalam pandangan fenomenologis tindakan ini pada prinsipnya lahir dari kesadaran yang didasari oleh motif yang berisifat intemal yakni *first type of motive* (berhubungan dengan *in order to motive*) dan *second type of motive* (berkaitan dengan because motive*).*

4. Penggunaan metode kualitatif ini memungkinkan untuk mengadakan penelitian secara holistik, dimana segala bentuk tindakan individu maupun kelompok bukan hanya disebabkan oleh satu faktor melainkan dari banyak faktor.
5. Kategori penelitian ini memberikan peluang untuk memahami fenomena berdasarkan *emic view* atau pandangan aktor setempat. Dalam hal ini status peneliti hanyalah sebatas orang yang belajar mengenai apa yang menjadi pandangannya, terutama yang terkait dengan upacara perkawinan adat

Karena prosesi perkawinan adat pada akhimya mengacu pada bati' dan wija masyarakat Bugis-Bone, maka terkait dengan makna subyektif yang harus dipahami dalam kerangka ungkapan mereka sendiri, karenanya harus dipahami melalui penelitian kualitatif. Dalam perspektif antropologi-sosial (simbolik-interpretatif), konsep ini dikenal dengan istilah *form the native's point of view*.

Dalam pengertian lain bahwa untuk memahami fenomena harus menggunakan kerangka pemahaman informan atau masyarakat lokal (*local knowledge*).

B. Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Bone. Dipilihnya sistem kekerabatan masyarakat Bugis-Bone (*bati'* dan *wija*) melalui hubungan kekerabatan sebagai subjek penelitian karena beberapa alasan, antara lain: 1) walaupun telah banyak tulisan mengenai perkawinan adat namun demikian masih sangat kurang studi-studi yang khusus membahas *bati*' dan *wija* sebagai komponen penentu sistem kekerabatan yang menggunakan persfektif antropologi-sosial secara serius, khususnya mengkaji aspek budaya lokalitas dan simbolik; 2) hingga kini sistem kekerabatan berdasarkan *bati'* dan *wija* bagi masyarakat Bugis- Bone masih tetap dilaksanakan sehingga tampak ada upaya mempertahankan nilai-nilai budaya lokal (tradisi) sehingga menunjukkan kekhasan tersendiri dalam pembentukan dan pengembangan sistem kekerabatannya. Karakteristik tersebut tercermin melalui prosesi perkawinan yang tetap menjadikan hukum adat (*panggaderang*) sebagai pusat pengendalian sosial sebagai suatu wujud kepatuhan yang dijalankan secara turun temurun dan memberikan manfaat dalam mencapai kesempumaan hidup manusia Bugis-Bone.

C. Tahapan Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan dan menggambarkan kekerabatan, maka penelitian ini tentunya sangat relevan dengan menggunakan metode etnografi.

Metode ini sendiri memiliki tahapan yang lazim digunakan yakni; (1) dimulai dengan memilih permasalahan; (2) mengumpulkan data kebudayaan; (3) menganalisis data kebudayaan; (4) memformulasikan hipotesis etnografis yang diperoleh dari data lapangan; (5) menganalisis data dan menuliskan laporan etnografi. Pada proses penerapannya kelima tahapan tersebut dapat saja dilakukan secara simultan karena mengingat masalah penelitian yang dipilih sifatnya masih tentatif sehingga dapat saja berubah sesuai dengan kondisi fenomena komunitas setempat setelah kita berada di lapangan (lokasi penelitian).

D. Penentuan Informan

Penelitian yang bersifat etnografis mengupayakan data dari sumber informasi yang diberikan oleh beberapa informan. Karakteristik informan dalam penelitian ini meliputi: orang yang dituakan dalam komunitasnya, pemangku adat dan pemuka masyarakat. Penggalian informasi lebih difokuskan pada pendalaman terhadap tokoh dan orang yang memahami (simpatisan) tentang kekerabatan dan orang yang mempunyai garis keturunan atau derajat darah yang tinggi. Melalui informan ini yang dijadikan sebagai obyek diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap sesuai dengan sasaran dan tujuan penelitian. Informan ini dapat dikategorikan menjadi tiga, yakni informan kunci, informan ahli dan informan biasa. Penentuan informan yang akan diteliti lebih jauh, tidak dilakukan secara acak tetapi dilakukan secara purposif (Abu Hamid, 1998:7). Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa kekerabatan secara intemal di Bone tidak

semua dipahami oleh masyarakat. Untuk itu informan yang dipilih tersebut relatif repsentatif untuk menggambarkan fenomena sosial budaya dan adat istiadat. Namun demikian dalam proses penelitian juga senantiasa dilakukan *cross-check* informasi terhadap informan yang lain untuk menemukan variasi dan deviasi prakteknya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan

Metode pengamatan dilakukan untuk memperoleh data sosial budaya dan adat istiadat, terutama data mengenai silsilah kekerabatan bugis Bone. . Dalam pengamatan digunakan alat perekam, berupa kamera untuk memotret dan menggambarkan sistem kekerabatan masyarakat Bugis-Bone melalui prosesi perkawinan adat.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan maksud untuk memahami implementasi peranan wija dan bati sebagai satu sinergi dengan menggunakan metode kualitatif. Digunakannya metode ini beranjak dari prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan tertulis atau lisan dari seseorang dan perilakunya yang dapat diamati. Dengan demikian konsekwensi yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data

melalui wawancara dengan informan yang diperkirakan memiliki informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan serangkaian wawancara mendalam (*indepth interview)* kepada informan dengan merujuk kepada pedoman wawancara (*guide interview*) berupa pertanyaan deskriptif, yaitu suatu pertanyaan yang mencari jawaban tentang segala hal yang berhubungan dengan topik penelitian. Namun demikian, pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya, selalu saja dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Tentu saja data yang dihimpun adalah semua paparan informan tentang apa saja yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Para informan tentunya dikategorikan sebagai anggota masyarakat atau memiliki kemampuan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan studi yang dikembangkan. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan dalam penelitian ini adalah ketersediaan waktu para informan untuk melakukan wawancara hingga penelitian selesai

3. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dalam suatu penelitian diharapkan untuk menambah referensi pengetahuan terhadap topik yang dikaji dalam studi ini. Pemilihan referensi dalam wujud literatur, seperti buku diseleksi sedemikian ketat dengan

memilih dengan mengacu kepada relevansi dengan topik studi mengenai silsilah sistem kekerabatan wija dan bati dalam masyarakat Bugis-Bone.

Studi pustaka ini dilakukan sejak pertama kali mengkonstruksi fokus studi hingga penelitian ini terlaksana. Pada studi pustaka ini pokok-pokok bahasan yang sudah ditetapkan sebelumnya terkadang mengalami revisi dalam perkembangan selanjutnya. Hal ini terjadi ketika ada temuan baru pada referensi atau literatur yang ditemukan, baik di perpustakaan maupun koleksi pribadi teman.

F. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang sifatnya deskriptif yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif. Pendekatan ini dimaksudkan karena berkaitan erat dengan sifat unik dari suatu realitas sosial dan tingkah laku manusia sebagai anggota komunitas. Sebagai model penelitian partisipasi, maka analisis data dilakukan seiring dengan kegiatan penelitian tanpa memisahkan waktu. Keseluruhan data yang dikumpulkan (tentunya yang relevan untuk penelitian) dianalisis pada tingkat reduksi data dengan model analisis deskriptif. Dalam pemahaman bahwa analisis ini tidak hanya berhenti sampai menguraikan data, tetapi juga dilakukan telaah kritis dari data yang dihimpun dengan mendiskusikan dari sejumlah pemikiran tentang sistem kekerabatan berdasarkan wija dan bati. Intinya adalah,

analisis dikembangkan dari data yang dikumpulkan selama penelitian dianalisis pada tingkat reduksi data, penyajian/penjelasan dan generalisasi.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam metode analisis adalah kategori dan reduksi data, koleksi dan penjelasan kasus-kasus yang bervariasi secara kontekstual, penyimpulan-penyimpulan sementara disusun dalam bentuk transkripsi data dan dibuat pertema setiap kali dari lapangan. Data yang tidak relevan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dipisahkan, sedangkan yang releven dikumpulkan. Deskripsi kausal kontekstual yang empirik memberikan pedoman agar peneliti dengan sungguh-sungguh mengoleksi data secara selektif bahwa hanya data yang mempunyai tempat dalam konteks kasus-kasus khusus yang nyata dan membuat penjelasan rasional yang diambil.

G. Pengertian Beberapa Konsep

Penelitian ini tidak bertujuan untuk memecahkan masalah mengenai apa itu bati' dan wija dalam sistem kekerabatan masyarakat Bugis-Bone akan tetapi bertujuan untuk bendeskripsikan konsep abbatireng sebagai sakah satu pranata sosial yang merupakan salah salah satu produk kebudayaan Bugis di Sulawesi Selatan. Namun sebagai pedoman operasional di lapangan, beberapa istilah yang menyangkut tema penelitian perlu dijabarkan sebagai berikut:

1. ***Bati***

Bati' adalah merupakan konsep kekerabatan Bugis-Bone yang mengarah pada penurunan derajat darah berdasarkan keturunan (biologis).Yang berlaku asas bapak yang menentukan bati atau turunan genealogis yang dikenal dengan ungkapan "*ambek-e mappabati*". Artinya garis keturunan bapak menjadi penentu bati, penentu derajat darah keturunan sedang derajat darah ibu berpengaruh sebagai pendukung.

2. Wija

Wija dalam konsep masyarakat Bugis-Bone hanya menunjuk pada turunan yang diperhitungkan sebagai jaringan kekerabatan berdasar kategori sosiologis. Penggunaan konsep turunan dalam wija tidak berdasarkan prinsip " *ambek-e mappabati"* tetapi berdasarkan sapaan sebagai kerabat.

3. Kekerabatan

Kekerabatan dalam terminologi Bugis-Bone dikenal *assiajingen* yang diatur dalam *adek akkalabinengeng* yaitu adat yang mengatur hubungan perkawinan atau kekerabatan, perkawinan bukan hanya melibatkan kedua mempelai akan tetapi melibatkan seluruh keluarga, sehingga seluruh keluarga. Keseluruhan keluarga itu, yaitu keluarga dari kedua belah pihak, keluarga ayah dan keluarga ibu dimasukkan dalam kategori sebagai kerabat. Meskipun demikian, dalam hal menentukan derajat darah yang diperhitungkan adalah pihak ayah dengan asas " *ambek-e mappabbati'* atau ayahlah yang menentukan bati darah turunan.

4. Panggadereng

Pangadereng adalah sebutan bagi sekumpulan aturan-aturan adat atau mengandung hal-hal yang ideal yang mengandung nilai-nilai normatif, juga meliputi hal-hal dimana seseorang yang dalam tingkah lakunya dan dalam memperlakukan diri dalam kegiatan sosial, bukan saja merasa ”harus” melakukannya, melainkan lebih jauh dari pada itu, ialah semacam ”larutan perasaan” bahwa seseorang itu adalah bagian integral dari *panggadereng*. Oleh sebab itu, panggadereng adalah wujud kebudayaan yang selain mencakup pengertian sistem norma dan aturan-aturan adat serta tata tertib, juga mengandung unsur-unsur yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan berupa peralatan – peralatan materil dan non materil.

5. Anakkarung

Anakkarung adalah sebutan bagi kelompok bangsawan masyarakat Bugis-Bone yang merupakan turunan *to manurung*. Anakkarung dalam masyarakat Bugis pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang memiliki derajat darah tertinggi dan memiliki status mulia, dihormati dan ditaati dalam masyarakat Bugis-Bone.

6. To Maradeka

To maradeka atau *to sama* (*to deceng*) adalah sebutan masyarakat Bugis yang menempati stratifikasi sosial menengah yaitu orang kebanyakan keturunan kelompok *anang* . Kelompok anang orang-orang pemiliki asli tanah lahan.

7. Ata'

Ata' merupakan merupakan pelapisan sosial dalam masyarakat Bugis-Bone yang posisinya berada di bawah. Ata' dalam konsep masyarakat Bugis pada umumnya merupakann orang yang hilang kemerdekaannya karena sesuatu ikatan dan langsung dukuasai oleg orang lain. Ata juga adalah lapian kecil/tambahan yang terdiri atas mereka yang kalah perang, melanggar aturan adat dan menjual diri.

8. Mitos To Manurung

Mitos *to Manurung* dalam sistem kekerabatan masyarakat Bugis-Bone yang menempatkan posisi tertinggi dalam stratifikasi sosial masyarakat. Titik awal munculnya derajat darah di Sulawesi Selatan dapat ditelusuri dalam *surek Lagaligo*. Mitos ini menceriterakan tentang Batara Guru yang turun dari *botinglangik* (langit) untuk memerintah berkuasa di *alekawa* (bumi Tana Luwu) yang kemudian kawin dengan *We Nyiliktimo* yang diceritakan muncul bersama *busa empong* (busa air) dari *uringliung* (dasar kedalaman) yang menjadi titik awal munculnya derajat darah. *To Manurung* Batara Guru dan keturunannya mempunyai derajat tertinggi yang memiliki legitimasi dan menjadi awal

perkawinan antarsepupu yang selanjutnya dianggap sebagai perkawinan ideal – *marriage-preferences*[90]. Sebelum turunnya *to manurung*, derajat darah tidaklah menjadi persoalan penting dalam kehidupan masyarakat para anang atau perkauman. Seluruh warga perkauman memiliki derajat yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari warga lainnya. Mesipun demikian, dalam perkaunan mengenal *matowa uluanang* sebagai pemimpin. Seorang matowa memiliki kemampuan dan wawasan luas, bijaksana serta membela hak-hak yang berkaitan dengan kepentingan warga. Lama kelamaan, dalam proses sosial, matowa menempati stratifikasi sosial tertinggi dan jabatan *amatowa* diwariskan kepada keturunannya.

9. Simbol

Simbol atau tanda dapat dilihat sebagai konsep-konsep yang dianggap oleh manusia sebagai pengkhasan sesuatu yang lain yang mengandung kualitas-kaulitas analisis-logis atau melalui asosiasi-asosiasi dalam pikiran atau fakta. Selain itu, dapat berupa objek, kejadian, bunyi bicara atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia. Fungsi simbol menstimulasi atau membawa suatu pesan mendorong pemikiran atau tindakan.

[90] Mereka dipercayai menempati stratifikasi sosial tertinggi secara sosio-kultural dan politik dalam masyarakat Bugis.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2006. Kebangkitan Peran Budaya, Editor, Laurence E. Harrison dan Samuel P. Huntington, LP3ES Indonesia, Jakarta.

Abdul Syani. 1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat.* Bandar Lampung: Dunia Pustaka Jaya.

Abu Hamid dan S. Meno (ed.,). 1986. *Beberapa Essay Antropologi.* Ujung Pandang : Humanika Press.

Abu Hamid, dkk. 2002.a. *Sejarah Daerah Sinjai.* Sinjai: Laporan Penelitian Yayasan Kebudayaan Pusaka.

Abu Hamid. 2002.b. *Budaya Politik dan Kepemimpinan di Sulawesi Selatan.* Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan.

Abu Hamid. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial, Suatu Strategi, Teknik dan Taktik Wawancara, Jilid I dan /I* . Makassar : Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Abu Hamid. t.Th. *Konsep Kerakyatan dalam Kebudayaan Orang Bugis di Sulawesi Selatan.* Makassar: Program Pascasama UNHAS.

Abu Hamid. t.Th. *Suatu Pedoman Teknik Penyusunan Questioner dan Teknik Wawancara:* Ujung Pan dang : Universitas Hasanuddin.

Abu Hamid. t.Th. Alat-Alat Kerajaan Sulawesi Selatan (daerah Bone).

Adinihardja, Kusnaka, 1976. Kerangka Studi Antroplogi Sosial, Bandung, Tarsito.

Andaya, Leonard, 2004. Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke 17 (Peterjemah Nurhady Sirimorok), Makassar, Ininnawa.

Anonim. 2004. Gella Puang Mangga; "Tuhan Bagi Kami Tidak Bertempat" Makassar: Laporan Penelitian LAPAR.

Anshari, Endang Saifuddin. 1983. *Wawasan Islam Pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya.* Bandung: Pustaka Salman.

Atkinson, Jane Monnig. 1982. "Religions in Dialogue: The Construction of an Indonesian Minority Religion". Dalam Rita Smith Kipp and Susan Rodgers *Indonesian Religions in Transition.* Tocson : The University of. Arizona Press.

Baal, J. Van, 1988. Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antnroplogi Budaya, Jakarta, Erlangga.

Basrah. 2005. Sistem Pengetahuan Lokal dalam Pengelolaan "Hutan Berbasis Masyarakat" di Kawasan Hutan Adat Karampuang. Makassar: Pascasarjana UNHAS.

Beilharz, Peter, 2003. Teori-Teori Sosial (Alih bahasa Sigit Jatmiko), Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Beilharz, Peter, 2003. Teori-Teori Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarat.

Benedict, Ruth, *Pattems of Culture*. Boston: Houghton Mifflin Co., 1980.

Colemen, Simon dan Helen Watson, 2005. Pengantar Antropologi, Nuansa Anggota IKAPI, Cet. Pertama, Ujung Pandang-Bandung.

Chabot Hendrik,1984 *"*Bontoramba, Sebuah Desa Gowa Sulawesi Selatan" dalam Koentjaraningrat *Masyarakat Desa di Indonesia.* Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Chagnon, Napoleon, 1968. *The Yanamano: The Fierce People* NewYork:

Clifford, J. dan Marcus, G. (eds.), 1986, *Writing Culture*, Berkeley: Univ. of Califomia Press.

Daeng Patunru, Abdurrazak, (et.al), 1986. Sejarah Bone. Makassar, CV. Walenae.

Daeng, Hans, J. 2000. Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan: Tinjauan Antropologis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 2006. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan.*

Emberm Carol R, & Malvin Ember, 1973. *Cultural Antropologi*. Appleton Century, New York.

Geertz, C., (1973), *The Interpretation of Culture*, New York: Basic Books.

Geertz, Clifford,2003. Pengetahuan Lokal, Penerjemah Vivi Ibubaikah), Yogyakarta, Merapi.

Hamzah. P, Aminah,dkk. 1984. Monografi Kebudayaan Bugis di Sulawesi Selatan, Pemda Provinsi Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.

Harris, Marvin, *"Culture, People, Nature; An Introduction to General Anthropology"*, New York, Harper and Row Publishers, 1988.

Hasbullah, Jousairi, 2006. *Social Capital* (Menuju Keunggulan Budaya manusia Indonesia, Jakarta, MR-United Press.

Haviland, William, A. 1993. Antropologi, Jilid 2, Jakarta, Erlangga.

Holt Rinehart and Winston 6 Jun'ichiro Itani. "The Society of Japanese Monkeys". *Japan Quarterly.* Jilid 8 (1961). hal. 421-430.

Husnaeni, 2004. *Ekspresi Simbolik dalam Entoarsitektur Rumah Tradisional Bugis di Kabupaten Bone, Suatu Tinjauan Antropologi Linguistik*. (Tesis). Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ihromi (ed), 1980. *Pokok-pokok Antropologi Budaya.* Jakarta: PT. Gramedia.

Kaplan David, 2002. *Teori Budaya* Jakarta: Pustaka Pelajar.

Keesing, Roger, B. 1989. Antropologi Budaya, Suatu Persfektif Kontemporer, Jakarta, Erlangga.

Koentjaraningrat, 1961. Metode-Metode, antropologi dalam Penyeleidikan Msayarakat dan Kebudayaan di Indonesia: Sebuah Ichtisar, Universitas, Djakarta.

Koentjaraningrat, 1977. Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Jakarta, PT. Dian Rakyat.

Koentjaraningrat, 1980. *Sejarah Teori Antropologi I.* Jakarta UI Press.

Koentjaraningrat, 1981. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Rineka Cipta.

Koentjaraningrat, 1993. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia.* Jakarta: Djambatan.

Koentjaraningrat, 2005. Pengantar Antropologi :Pokok-Pokok Etnografi, Rineka Cipta, Jakarta.

Kuntowijoyo, 1987. Budaya dan Masyarakat, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana.

Leenhouwers, P. 1988. Manusia dalam Lingkungannya, Refkleksi Filsafat Tentang Manusia, Jakarta, Gramedia.

Linton, Ralph 1945. *The Culture Background of Pesonality.* New York: Appleton-Century-Crofts.

Mahmud, Amir. 2002. *Kembalikan Nama Besar Bone*. Intermedia Publishing Makassar.

Malinowski, Bronislaw, 1987. *Tertib Hukum Dalam Masyarakat Terasing.*

Mappangara, Suriadi, 2004. Kerajaan Bone dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.

Mattulada, 1975. Latoa :Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.

Mattulada, 1998. Sejarah,Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.

Meleong, J. Lexy. 1996 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya.

Palmer Richard, 2003. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi.* Jakarta: Pustaka Pelajar.

Pelras, Cristian, 2006. *Manusia Bugis* Jakarta: Forum Jakarta – Paris.

Pritchard, E.E.F. Vans, 1986. Antropologi Sosial, terjemahan Nancy Simanjuntak, Jakarta, Bumi Aksara.

Richardson, Miles, “Anthropologist-the Myth Teller,” *American Ethnologist*, 2, no.3 (August 1975).

Rorty, Richard, 1989, *Contingency, Irony and Solidarity*, Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Saifuddin, Achmad Fedyani, 2006, Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma, Kencana, Jakarta.

Siregar, Leonard 2002. *Antropologi Dan Konsep Kebudayaan*. Jumal Antropologi Universitas Cenderawasih.

Strauss-Levi, Claude, 2005. Antropologi Struktural, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Tylor, W.W, ed., 1973. *Culture and Life : Essay in Memory of Clyde Kluckohn.* Canbordale: Southem IIlinois University Press.

PENGESAHAN PROPOSAL DISERTASI

PERKAWINAN ADAT BUGIS BONE

(Suatu Analisis Antropologi Budaya)

Diajukan oleh :

Eliza Meiyani

P0603303302

Menyetujui

Tim Promotor,

Prof. Dr. H. Abu Hamid

Promotor

Dr. Edward L. Poelinggomang, MA	**Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA**
Co-Promotor	**Co-Promotor**

Ketua Program Studi

Ilmu Sosial,

Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU